



<http://jabar.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA BARAT
MENURUT PENGGUNAAN
2011-2013**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA BARAT
MENURUT PENGGUNAAN**

*Gross Regional Domestic Product of Jawa Barat
by Expenditure*

2011 - 2013

<http://jabar.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT

**Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat
Menurut Penggunaan**

*Gross Regional Domestic Product of Jawa Barat
by Expenditure*

2011 – 2013

ISSN : 0854.9303
Nomor Publikasi : 32550.1202
Katalog BPS : 9207.32
Ukuran Buku : 6.6 inchi x 10 inchi
Jumlah Halaman : 63 + vii halaman

Naskah :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :
BPS Provinsi Jawa Barat

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

PENGANTAR

Dalam rangka pembenahan struktur perekonomian suatu wilayah perlu dilakukan *mapping* atau pemetaan profil perekonomian secara akurat yang tentunya memerlukan data yang representatif. PDRB, menurut lapangan usaha maupun penggunaan, merupakan indikator yang paling lazim digunakan untuk mencermati dinamika perekonomian menurut sektor yang memproduksi maupun komponen yang menggunakan. PDRB menurut penggunaan merupakan salah satu penyajian perekonomian daerah yang dilihat dari sisi permintaan (*demand side*) terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi (Rumahtangga, Pemerintah dan Lembaga non Profit), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Inventori, dan Ekspor serta Impor.

Penghitungan komponen-komponen tersebut menghasilkan beberapa indikator ekonomi yang menjadi tolok ukur kinerja perekonomian makro di Jawa Barat, diantaranya struktur perekonomian Jawa Barat, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat, investasi yang terbentuk dalam hal ini pembentukan modal tetap yang ditunjukkan oleh komponen PMTB, serta kinerja ekspor dan impor.

Publikasi ini menyajikan PDRB Menurut Penggunaan selama tiga tahun terakhir tahun 2011 sampai dengan 2013, Jawa Barat khususnya dari sisi permintaan. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perencana dan pengambil kebijakan untuk menentukan arah pembangunan khususnya di bidang ekonomi pada level regional Jawa Barat.

Atas bantuan dari berbagai pihak sehingga tersusunnya publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, Maret 2014
BPS Provinsi Jawa Barat
Kepala,



Gema Purwana, SE, M.Si
NIP. 19551003 197703 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
BAB II. METODOLOGI	6
2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7
2.1.1. Konsep dan Definisi	7
2.1.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data	8
2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPR)	12
2.2.1. Konsep dan Definisi	12
2.2.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data	13
2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	13
2.3.1. Konsep dan Definisi.....	13
2.3.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data.....	14
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	14
2.4.1. Konsep dan Definisi.....	14
2.4.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data.....	15
2.5. Perubahan Inventori.....	16
2.6. Ekspor dan Impor.....	16
2.6.1. Konsep dan Definisi.....	16
2.6.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data.....	17
BAB III. TINJAUAN EKONOMI REGIONAL MENURUT PENGGUNAAN	19
3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	22

3.2.	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit.....	28
3.3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	30
3.4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	32
3.5.	Perubahan Inventori.....	36
3.6.	Ekspor dan Impor.....	39
3.7.	Sumber Laju Pertumbuhan (<i>Source of Growth/SOG</i>)	47
3.8.	Kesimpulan	50

<http://jabar.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB Jawa Barat menurut Penggunaan Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (jutaan rupiah)	20
Tabel 2.	PDRB adh Berlaku, PMTB, Persentase PMTB terhadap Total PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013.....	34
Tabel 3.	Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekspor dan Impor Terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2011-2013	42
Tabel 4.	Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011-2013.....	48

<http://jabar.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Perkembangan Peranan Komponen PDRB Penggunaan Atas dasar Harga Berlaku di Jawa Barat Tahun 2011-2013.....	21
Grafik 2.	MPC (<i>Marginal Propensity to Consume</i>), PDRB dan Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 Provinsi Jawa Barat (Triliun Rp).....	24
Grafik 3.	Peranan Konsumsi Makanan dan Non Makanan Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013 (Persen).....	25
Grafik 4.	Nilai Konsumsi Makanan dan Non Makanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013 (Rp Triliun).....	26
Grafik 5.	KRT perkapita dan LPE perkapita serta Laju Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013.....	27
Grafik 6.	KRT perkapita atas dasar harga Konstan (Rp Juta) dan Laju Pertumbuhannya (Persen) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013.....	28
Grafik 7.	Nilai Konsumsi LNPRT dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2011-2013.....	29
Grafik 8.	Peranan Konsumsi LNPRT Tahun 2011-2013 di Provinsi Jawa Barat (persen)	30
Grafik 9.	Nilai Konsumsi Pemerintah dan Laju Pertumbuhan Tahun 2011-2013 di Provinsi Jawa Barat	31
Grafik 10.	Peranan Konsumsi Pemerintah Tahun 2011-2013 di Provinsi Jawa Barat....	32
Grafik 11.	PMTB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2011-2013 (triliun rupiah).....	33
Grafik 12.	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PMTB Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013 (Persen).....	34
Grafik 13.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013.....	35
Grafik 14.	Nilai Perubahan Inventori dan Laju Pertumbuhan Perubahan Inventori Jawa Barat Tahun 2011-2013	37
Grafik 15.	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Perubahan Inventori Jawa Barat Tahun 2011-2013	37
Grafik 16.	Peranan Perubahan Inventori Terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2011-2013 (Persen)	38
Grafik 17.	Nilai Ekspor (Juta Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekspor (Persen) Jawa Barat Tahun 2011-2013	40
Grafik 18.	Peranan Komponen Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Jawa Barat	

	Tahun 2011-2013 (Persen)	41
Grafik 19.	Peranan Komoditas Ekspor Non Migas Utama Jawa Barat Tahun 2011-2013 (Persen)	43
Grafik 20.	Nilai Impor (Juta Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Impor (Persen) Jawa Barat Tahun 2011-2013	44
Grafik 21.	Peranan Komponen Impor Barang dan jasa Terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2011-2013 (Persen)	45
Grafik 22.	Peranan Komoditas Impor Non Migas Utama di Jawa Barat Tahun 2011-2013 (Persen)	46
Grafik 23.	Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011-2013 (Persen).....	49

<http://jabar.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah).....	55
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah).	56
Lampiran 3.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013 (Persen).....	57
Lampiran 4.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013 (Persen).....	58
Lampiran 5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013 (Persen).....	59
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013 (Persen).....	60
Lampiran 7.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013 (Tahun 2000 = 100,00) (Persen).....	61
Lampiran 8.	Inflasi Tahun 2011-2013 (Persen).....	62
Lampiran 9.	Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011-2013 (jutaan rupiah).....	63

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlambatan ekonomi global masih berlangsung hingga akhir tahun 2012 sehingga berimbas pada perekonomian nasional terutama pada permintaan barang dan jasa serta investasi. Perekonomian Indonesia selama tahun 2010-2012 termasuk sektor minyak dan gas masih tumbuh di atas 6 (enam) persen meski demikian pertumbuhan ini melambat di tahun 2013 menjadi sebesar 5,78 persen. Sementara itu perekonomian wilayah Jawa Barat selama periode empat tahun terakhir (2010-2013) mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 6 (enam) persen meski dalam tiga tahun terakhir (2011-2013) memiliki kecenderungan pertumbuhan yang melambat dari setiap periodenya.

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai ini dapat dikatakan sebuah prestasi karena dapat tumbuh dan bertahan pada level di atas 6 (enam) persen di tengah hantaman krisis global. Hal ini dimungkinkan karena struktur perekonomian nasional dan di wilayah Jawa Barat didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Kontribusi konsumsi rumah tangga pada tahun 2013 di Jawa Barat tercatat sebesar 57,28 persen, meski demikian komponen konsumsi rumah tangga selama tiga tahun terakhir (2011-2013) memiliki kecenderungan penurunan kontribusi dari tahun ke tahun. Struktur perekonomian domestik yang dominan merupakan suatu potensi sehingga memungkinkan perekonomian lebih kuat serta mampu bertahan dalam menghadapi tantangan krisis global dan kebijakan internasional. Stabilitas pertumbuhan ekonomi yang berhasil diciptakan dalam empat tahun terakhir merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang optimal, stabil dan efisien merupakan salah satu elemen yang tercakup dalam sasaran pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dengan dimensi kontinuitas dan berkeadilan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan berkelanjutan serta merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan dengan dua pilar lainnya yaitu pembangunan social dan lingkungan.

Stabilisasi pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu upaya menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan, hal ini memerlukan dukungan pemerintah dalam menstimulasi aktivitas ekonomi. Bentuk dukungan yang esensial adalah perbaikan dan penyediaan infrastruktur, perbaikan dan penyederhanaan birokrasi, dan deregulasi serta berbagai kebijakan untuk meningkatkan penciptaan nilai tambah bagi perekonomian.

Beberapa regulasi dan kebijakan yang disusun untuk mendukung aktivitas ekonomi juga melahirkan tantangan tersendiri dalam penerapannya seperti terjadinya inflasi yang tidak dapat dihindarkan. Regulasi pembatasan aliran impor komoditas hortikultura yang dikeluarkan pemerintah melalui Kemendag No 16/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 22 April 2013 mengenai ketentuan impor produk hortikultura. Pembatasan impor dilakukan untuk menghindari derasnya aliran impor yang akan mengakibatkan defisit neraca perdagangan. Sementara itu di sisi lain regulasi ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas komoditas hortikultura dalam negeri. Efek yang dirasakan di tingkat pasar adalah kenaikan harga beberapa komoditas hortikultura. Hal ini disebabkan oleh jumlah penyediaan dalam negeri yang belum mampu mengimbangi jumlah permintaan konsumen fenomena ini tercatat dalam inflasi Jawa Barat pada Bulan Mei 2013 sebesar 0,19 persen.

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN memberikan konsekuensi kepada kenaikan harga BBM per tanggal 22 Juni 2013 dimana kebijakan ini juga untuk mendorong penggunaan energy alternative dan mengurangi tekanan APBN akibat subsidi yang semakin membengkak untuk membayar impor BBM. Kenaikan Tarif Dasar Listrik sepanjang tahun 2013 diterapkan dalam empat tahap yang diberlakukan pada hari pertama bulan Januari, April, Juli dan Oktober tahun 2013.

Tantangan dari sisi moneter terhadap aktivitas perekonomian sepanjang tahun 2013 adalah pelemahan kurs Rupiah terhadap USD terjadi pada triwulan keempat tahun 2013 dengan puncaknya di bulan Desember 2013 sehingga berimbas terhadap kenaikan harga barang konsumsi yang berasal dari impor meski kontribusinya kecil yaitu sebesar 2,51 persen pada tahun 2012, selain itu eksportir banyak diuntungkan karena bertransaksi dengan USD sehingga secara keseluruhan nilai ekspor mampu terdongkrak naik. Kenaikan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang terjadi pada paruh kedua tahun 2013 memberikan efek terhadap peningkatan suku bunga untuk kredit konsumsi, modal kerja dan investasi, sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi aktivitas konsumsi dan dunia usaha dalam menjalankan usahanya dan melakukan investasi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian. Pengaruh penurunan aktivitas konsumsi dan investasi akan mempengaruhi kinerja perekonomian dari sisi permintaan.

Struktur permintaan dalam suatu perekonomian akan tergambar dari penggunaan barang dan jasanya, hal ini dapat dijadikan informasi untuk memberikan stimulus bagi penciptaan nilai tambah. Pendekatan yang akan disajikan dalam publikasi ini adalah penghitungan PDRB menurut penggunaan. Data agregat yang dapat diukur dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan

adalah konsumsi akhir, pembentukan modal, perubahan inventori dan net ekspor. Konsumsi akhir menggambarkan pendapatan masyarakat/institusi yang dibelanjakan untuk mengkonsumsi produk domestik yang dihasilkan, pembentukan modal merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan, perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bermakna penambahan atau pengurangan, selanjutnya ekspor netto adalah selisih antara angka ekspor dengan impor, baik antar negara maupun antar provinsi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat diukur dengan menggunakan penciptaan nilai tambah yang diperoleh suatu wilayah dalam satu periode atau disebut Produk Domestik Regional Bruto, penghitungannya menggunakan tiga macam pendekatan yaitu (1) pendekatan produksi mengukur tingkat produktivitas suatu wilayah, (2) pendekatan penggunaan mengukur bagian produk regional yang digunakan untuk keperluan konsumsi akhir, pembentukan modal dan ekspor (3) pendekatan pendapatan mengukur balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki atau dikuasai oleh penduduk suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Data PDRB ini dapat digunakan untuk mengamati indikator-indikator ekonomi makro untuk menganalisis perekonomian dalam menentukan arah kebijakan serta mengevaluasi hasil pembangunan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, pendapatan perkapita dan indikator ekonomi lainnya. Di sisi lain, indikator ekonomi memerlukan analisis dari sisi permintaan (*demand*). Data yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran indikator ekonomi dari sisi *demand* tersebut adalah PDRB yang dihitung menurut penggunaan.

Maksud dan tujuan penulisan publikasi PDRB sisi penggunaan adalah untuk meningkatkan ketersediaan data indikator makro ekonomi dari sisi permintaan. Ketersediaan data tersebut adalah usaha untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sangat membutuhkan gambaran tentang ukuran kinerja pembangunan dan penetapan strategi-strategi yang akan dilakukan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Data PDRB Penggunaan Jawa Barat merupakan potret kinerja pembangunan ekonomi makro Jawa Barat yang dilihat dari sisi permintaan yang terdiri dari komponen Konsumsi, Investasi dan Ekspor-Impor. Selain itu, PDRB menurut penggunaan juga dapat digunakan untuk melihat sumber-sumber pertumbuhan di wilayah Jawa Barat yang diharapkan menjadi patokan untuk alat perencanaan bagi Pemerintah Daerah serta sebagai bahan kajian yang bermanfaat bagi masyarakat pengguna data pada umumnya.

BAB II METODOLOGI

PDRB menurut penggunaan (*expenditure*) merupakan gambaran penggunaan barang/jasa yang diproduksi oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Struktur penggunaan produk barang dan jasa secara makro merupakan refleksi dari permintaan (*demand*) suatu wilayah terhadap produk barang/jasa. Secara umum, permintaan barang/jasa terbagi dalam dua bagian besar yaitu Permintaan Antara (*Intermediate Output*) dan Permintaan Akhir (*Final Demand*). Permintaan antara adalah produk barang/jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan/proses produksi pada unit usaha lainnya. Sedangkan permintaan akhir adalah produk barang/jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir untuk rumah tangga, Lembaga Non Profit yang melayani Rumah tangga (LNPR) dan pemerintah; kebutuhan investasi untuk unit usaha; dan kebutuhan luar wilayah (ekspor) .

Berdasarkan teori keseimbangan, dengan adanya produksi (*supply*) dan permintaan (*demand*), maka terjadi proses transaksi ekonomi. Dari sisi produsen transaksi tersebut menciptakan pendapatan, sedangkan dari sisi konsumen menimbulkan pengeluaran. Hubungan antara pendapatan dan pengeluaran terhadap barang dan jasa dapat ditulis sebagai berikut :

**PDRB SAMA DENGAN NILAI SELURUH PENGELUARAN AKHIR
DIKURANGI DENGAN NILAI TOTAL IMPOR**

Pengeluaran akhir merupakan pembelian dari semua barang/jasa (untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan LNPR, konsumsi pemerintah, barang modal, perubahan persediaan, seluruh barang/jasa yang diekspor) yang disuplai dalam suatu perekonomian. Nilai pengeluaran akhir tersebut akan melebihi output yang diproduksi unit kegiatan ekonomi domestik dengan nilai sebesar nilai total

impor barang dan jasa. Sehingga nilai produksi domestik akan diperoleh dari selisih pengeluaran akhir dengan total impor, yang persamaannya dapat ditulis :

$$Y = C_h + C_n + C_g + I_i + I_s + X - M \quad \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

C_h : Konsumsi Rumah Tangga (*Household*)

C_n : Konsumsi Lembaga Non Profit (*Non Profit Institution*)

C_g : Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan (*Government*)

I_i : Pembentukan Modal Tetap Bruto (*Investment*)

I_s : Perubahan Inventori (*Capital Stock*)

X : Ekspor

M : Impor

Y : PDRB.

Dari persamaan (1) dapat disederhanakan menjadi :

$$Y = C + I + X - M \quad \dots\dots\dots (2)$$

di mana :

C : Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), Pemerintah dan Pertahanan

I : Investasi

X : Ekspor

M : Impor

2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

2.1.1. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dikurangi dengan hasil penjualan neto dari

barang bekas atau apkiran. Pengeluaran tersebut termasuk pembelian aktiva berwujud yang tidak dapat diproduksi kembali (kecuali tanah) seperti hasil karya seni, barang-barang koleksi dan barang antik. Termasuk juga pembelian barang tahan lama seperti meubeler, sepeda motor, mobil dan barang elektronik (komputer, TV, radio) dan imputasi sewa rumah sendiri. Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga meliputi nilai barang dan jasa yang dihasilkan untuk konsumsi sendiri seperti hasil kebun, peternakan, kayu bakar dan biaya hidup lainnya serta barang-barang dan jasa.

Di samping itu pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya termasuk dalam konsumsi rumah tangga. Pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening air, listrik, telepon dan lain-lain merupakan konsumsi rumah tangga.

2.1.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

- 1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga di pasar suatu daerah adalah pembelian langsung di pasar tersebut baik oleh penduduk maupun rumah tangga bukan penduduk daerah tersebut (staf kedutaan asing dan turis domestik maupun asing).
- 2). Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi butir satu di atas, ditambah pembelian langsung penduduk daerah ini yang dilakukan di luar negeri atau daerah lain, dikurangi pembelian langsung di pasar domestik oleh rumah tangga di luar penduduk daerah tersebut (staf kedutaan asing dan turis domestik maupun asing).

Dalam kasus batas, pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh penduduk yang sedang melakukan perjalanan ke daerah lain (dalam atau luar negeri) baik dalam rangka bertugas, urusan bisnis atau untuk keperluan lainnya sudah terhitung di rumah tangga yaitu melalui konsumsi perkapita.

Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Provinsi Jawa Barat. Dari hasil Susenas diperoleh data rata-rata konsumsi perkapita seminggu untuk kelompok makanan dan rata-rata konsumsi perkapita sebulan untuk kelompok bukan makanan. Harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi menggunakan rata-rata harga eceran dari Statistik Harga Konsumen Provinsi Jawa Barat. Di samping itu digunakan data lainnya seperti PDRB perkapita atas dasar harga konstan, Indeks Harga Konsumen (IHK) dan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pengeluaran konsumsi kelompok makanan terdiri dari pengeluaran untuk :

- 1). Makanan, yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan dan udang segar dan sejenisnya, ikan dan udang yang diawetkan dan sejenisnya, daging segar, daging yang diawetkan, hasil ikutan daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, bahan minuman, bumbu-bumbuan dan konsumsi bahan makanan lainnya.
- 2). Makanan dan minuman jadi.
- 3). Tembakau dan sirih, yang meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu dan tembakau.

Pengeluaran untuk kelompok bukan makanan terdiri dari pengeluaran untuk :

- a). Perumahan, bahan bakar, air dan penerangan.
- b). Aneka barang dan jasa.
- c). Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.

- d). Pajak dan asuransi.
- e). Keperluan untuk pesta dan upacara.

Total pengeluaran konsumsi rumah tangga keseluruhan diperoleh dari pengeluaran perkapita setahun dikalikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkiraan pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk tahun-tahun yang tidak ada data Susenasnya dihitung berdasarkan elastisitas pendapatan dari Susenas yang ada.

a. Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan

Perkiraan konsumsi kelompok makanan digunakan model fungsi eksponensial. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi, tetapi pada suatu saat (titik jenuh) konsumsi tersebut mulai menurun, dengan bentuk kurva seperti parabola.

Fungsi eksponensial tersebut adalah:

$$Q_i = a \cdot Y_i^b$$

di mana :

Q_i : Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (kuantum)

Y_i : Pendapatan perkapita sebulan

a : Konstanta

b : Koefisien elastisitas.

Koefisien elastisitas (b) yang telah diuji digunakan untuk memperkirakan konsumsi perkapita pada tahun yang tidak ada data Susenasnya. Konsumsi perkapita tahun lainnya dapat diperkirakan dengan menggunakan peubah lain yaitu perubahan pendapatan perkapita (atas dasar harga konstan), dan data konsumsi perkapita (Susenas) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$C_{n+1} = C_n + (C_n \cdot dp \cdot b)$$

di mana :

C_{n+1} : Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun ke-(n+1)

C_n : Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun dasar ke-(n)

dp : Perubahan pendapatan perkapita harga konstan tahun ke-n dengan tahun ke-(n+1)

b : Koefisien elastisitas.

Nilai konsumsi atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan konsumsi dalam satuan kuantum dengan harga eceran pada tahun yang bersangkutan. Harga konsumen atau harga eceran merupakan harga yang dibayar oleh rumah tangga konsumen yang tujuannya untuk dikonsumsi. Harga tersebut merupakan rata-rata harga eceran di kota dan harga di pedesaan. Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan didapatkan dengan metoda *revaluasi* artinya konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga tahun dasar.

b. Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Bukan Makanan

Perkiraan konsumsi rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menggunakan model regresi linier. Artinya, setiap kenaikan pendapatan akan selalu diikuti oleh penambahan permintaan konsumsi kelompok bukan makanan misalnya permintaan akan pakaian, dan lain sebagainya. Model yang digunakan sebagai berikut :

$$Q_i = a + (b \cdot Y_i)$$

di mana :

Q_i : Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (kuantum)

Y_i : Pendapatan perkapita sebulan

a : Konstanta

b : Koefisien elastisitas

Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan pada tahun-tahun dimana data Susenas tersedia, diperoleh dengan cara mendeflasi nilai konsumsi (nilai data Susenas) dengan IHK yang sesuai dengan jenis pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi.

Pada tahun-tahun dimana data Susenas tidak tersedia maka nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku diperoleh dengan metode model regresi linier yang menghasilkan koefisien elastisitas permintaan yang dikalikan dengan pendapatan, kemudian mengalikan total nilainya dengan IHK.

2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

2.2.1. Konsep dan Definisi

Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah lembaga formal maupun informal yang dibentuk atau dibiayai oleh perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka menyediakan jasa pelayanan yang bersifat non komersial khususnya bagi anggota masyarakat umum tanpa adanya motivasi untuk meraih keuntungan.

Bentuk LNP yang melayani rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Kemasyarakatan,
2. Organisasi Sosial,
3. Organisasi Profesi,
4. Perkumpulan Sosial / Kebudayaan / Olah raga dan Hobi,

5. Lembaga Swadaya Masyarakat,
6. Lembaga Keagamaan,
7. Organisasi Bantuan Kemanusiaan / Beasiswa.

2.2.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Penyusunan perkiraan konsumsi LNPRT dilakukan dengan menggunakan metoda langsung dari hasil survei khusus yaitu diperoleh dari penjumlahan output sub sektor jasa sosial dan kemasyarakatan dikurangi surplus usahanya.

Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 sesuai dengan kegiatan masing-masing subsektornya, seperti penghitungan menurut lapangan usaha yaitu metode deflasi dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sesuai dengan masing-masing kegiatan, atau ekstrapolasi dengan menggunakan indeks jumlah unit kegiatan atau indeks jumlah tenaga kerja.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

2.3.1. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai nilai output atas pelayanan pemerintah dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit yang kegiatannya yang tidak dapat dipisahkan. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sama dengan nilai barang dan jasa yang digunakan oleh pemerintah untuk konsumsinya pada saat itu.

Output pemerintah tidak dijual sehingga nilainya diukur dengan biaya produksinya, yaitu jumlah konsumsi antara, konsumsi pegawai, konsumsi modal tetap dan pajak tak langsung. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini mencakup pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Nilai barang dan jasa yang dikonsumsi sendiri oleh pemerintah tidak dapat diperoleh secara langsung karena produksi sektor ini tidak dijual. Oleh karena itu

untuk memperoleh nilainya diperkirakan dari besarnya biaya produksi yang dikeluarkan.

2.3.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Penghitungan konsumsi pemerintah menggunakan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Desa yang diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3. Laporan keuangan tersebut meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pensiun dan subsidi, belanja pemeliharaan barang, belanja perjalanan dinas dan belanja rutin lainnya.

Selain itu digunakan juga Neraca Produksi Pemerintah Pusat dan Pertahanan Keamanan (atas dasar harga berlaku) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), data jumlah pegawai negeri sipil pusat dan daerah serta Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja pembangunan atas dasar harga berlaku diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3.

Untuk memperkirakan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dilakukan pendekatan sebagai berikut :

- 1). *Ekstrapolasi* belanja pegawai dengan indeks jumlah pegawai.
- 2). *Deflasi* belanja barang dengan IHPB tanpa ekspor tahun yang sesuai.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

2.4.1. Konsep dan Definisi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meliputi seluruh pengeluaran untuk unit produksi yang menambah daya produksi aktiva tetap dikurangi dengan penjualan dari barang-barang modal bekas ditambah penjualan barang-barang lain yang berasal dari daerah atau negara lain.

Secara rinci, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terdiri dari :

- a). Penambahan bersih (baru atau bekas) oleh produsen, asset berwujud yang dapat diproduksi kembali yang mempunyai umur satu tahun atau lebih dan digunakan bukan untuk keperluan militer.
- b). Pengeluaran atas peningkatan dan perubahan barang-barang modal yang diharapkan memperpanjang umur barang tersebut atau dapat meningkatkan produktivitasnya.
- c). Pengeluaran atas reklamasi tanah dan perbaikannya, pengembangan dan perluasan perkebunan, pertambangan, hutan, lahan pertanian dan perikanan.
- d). Penambahan ternak yang dipelihara untuk diambil tenaga, susu, bulu dan pembibitan ternak potong.

2.4.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Pembentukan Modal Tetap Bruto dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing lapangan usaha. Di samping itu, pembentukan modal dapat juga dihitung berdasarkan arus barang atau *Commodity Flow*.

Pembentukan modal tetap menurut lapangan usaha mencakup sembilan sektor, yaitu :

- 1). Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan,
- 2). Pertambangan dan Penggalian,
- 3). Industri Pengolahan,
- 4). Listrik, Gas dan Air Bersih,
- 5). Bangunan,
- 6). Perdagangan, Hotel dan Restoran,
- 7). Pengangkutan dan Komunikasi,

- 8). Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,
- 9). Jasa-jasa.

2.5. Perubahan Inventori

Data mengenai nilai perubahan inventori dalam komponen PDRB masih merupakan perkiraan kasar, karena dihitung dari selisih PDRB dengan komponen permintaan akhir lainnya seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor neto. Dengan demikian, didalamnya masih terkandung selisih statistik (*Statistical Discrepancy*) yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

2.6. Ekspor dan Impor

2.6.1. Konsep dan Definisi

Ekspor barang dan jasa merupakan suatu komponen dari permintaan akhir, tetapi impor merupakan sumber penyediaan barang dan jasa, oleh karena impor bukan merupakan produksi domestik jadi harus dikurangkan dari total penggunaan dalam PDRB.

Ekspor dan impor barang dan jasa meliputi angkutan dan komunikasi, jasa asuransi serta barang dan jasa lain seperti jasa perdagangan yang diterima pedagang suatu daerah karena mengadakan transaksi penjualan di luar daerah dan pembayaran biaya kantor pusat perusahaan induk oleh cabang dan anak perusahaan di luar daerah.

Pembelian langsung di pasar suatu daerah oleh bukan penduduk termasuk ekspor barang dan jasa, serta pembelian di luar daerah oleh penduduk daerah tersebut dikategorikan sebagai impor. Pengeluaran untuk biaya perjalanan yang dibayar oleh majikan diperlakukan sebagai ekspor dan impor barang dagangan dan bukan sebagai pembelian langsung.

Yang tidak termasuk ekspor dan impor barang adalah barang milik penduduk atau bukan penduduk suatu daerah yang melintasi batas geografis suatu daerah karena merupakan tempat persinggahan, barang untuk peragaan, barang contoh dan barang untuk keperluan sehari-hari wisatawan mancanegara/domestik.

Ekspor barang antar negara dinilai dengan harga *f.o.b. (free on board)*, sedangkan impor barang dinilai dengan harga *c.i.f. (cost, insurance and freight)*. Ekspor jasa dinilai pada saat jasa tersebut diberikan ke bukan penduduk, sedangkan impor jasa dinilai pada saat jasa diterima oleh penduduk.

Penduduk yang dimaksud di sini adalah lembaga pemerintah, perorangan, perusahaan swasta, perusahaan negara serta lembaga swasta non profit yang berada di daerah tersebut.

2.6.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Data ekspor dan impor Jawa Barat masih sangat terbatas. Data yang dapat diperoleh hanya transaksi dengan luar negeri. Data transaksi dengan luar negeri diperoleh dari Statistik Ekspor Impor terbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Data ekspor impor antar pulau/Provinsi diperoleh dari Statistik Bongkar Muat, Terminal Bis, Angkasa Pura melalui Dinas Bea dan Cukai.

Data lain yang diperlukan adalah IHPB untuk ekspor dan impor yang diperoleh dari Buletin Ringkas terbitan BPS dan juga data Input-Output Jawa Barat. Nilai ekspor dan impor yang diperoleh dari transaksi barang dan jasa dengan luar negeri dan antar pulau/Provinsi merupakan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku.

Ekspor dan impor antar negara merupakan ekspor impor antar negara menurut pelabuhan di Jawa Barat, sedangkan ekspor impor antar pulau/Provinsi menggunakan ratio Input-Output Jawa Barat. Nilai ekspor impor atas dasar harga

konstan 2000 diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku dengan IHPB untuk ekspor dan impor.

<http://jabar.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN EKONOMI REGIONAL MENURUT PENGGUNAAN

Pengamat ekonomi dari LIPI, Latif Adam, mengatakan setidaknya ada empat ancaman yang menghadang pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2013 yaitu politik, inflasi, krisis global, dan hubungan industrial (AntaraneWS). Pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan kondisi empirik perekonomian Jawa Barat ditinjau dari sisi penggunaan diindikasikan dengan melambatnya pertumbuhan pada beberapa komponen.

Suhu politik mulai menghangat pada tahun ini, sebagai persiapan perhelatan nasional pemilihan umum dan pemilihan presiden pada tahun 2014. Partai politik mulai melakukan pengkaderan dan berbagai persiapan yang diperlukan dalam pertarungan pada perhelatan lima tahunan tersebut. Hal tersebut terlihat dari peningkatan yang cukup signifikan pada konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumahtangga.

Inflasi juga merupakan penghambat bagi pertumbuhan perekonomian pada tahun 2013, hal tersebut disebabkan oleh kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu pengaruh dari tidak seimbangnya antara sisi penyediaan dan permintaan komoditi tertentu yang menyebabkan lonjakan harga dalam waktu singkat. Pengaruh inflasi mempengaruhi penurunan tingkat daya beli masyarakat, hal tersebut tergambar dari pertumbuhan konsumsi rumahtangga yang melambat.

Krisis global sangat mempengaruhi perekonomian Jawa Barat, mengingat peranan ekspor dan impor yang cukup berarti. Muatan impor dalam perekonomian terutama sektor industry cukup signifikan, terutama pada industry yang berorientasi ekspor. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekspor meningkat

signifikan namun laju pertumbuhan impor meningkat lebih tinggi. Sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan net ekspor.

Hubungan industrial pada tahun 2013 agak terganggu dengan maraknya demo buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Regional (UMR). Aksi tersebut menyebabkan tekanan pada kinerja sektor industry, dan menurunnya minat investor yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan investasi di Jawa Barat.

Tabel 1.
PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2011-2013 (jutaan rupiah)

Uraian	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran KRT	510.187.921,23	551.404.348,16	613.048.304,04
a. Makanan	274.837.301,85	298.382.700,46	337.117.572,71
b. Non Makanan	235.350.619,38	253.021.647,70	275.930.731,33
2. Konsumsi LNP	3.556.229,43	3.864.741,76	4.917.907,97
3. Konsumsi Pemerintah	75.173.760,19	83.110.606,89	94.796.047,52
4. PMTB	153.905.249,49	175.201.065,80	194.329.431,57
5. Inventori	39.453.621,17	48.468.148,56	52.046.792,34
Diskrepansi	24.322.837,30	18.379.168,22	31.578.964,30
6. Ekspor	305.330.654,95	340.280.727,23	389.418.174,95
a. Antar Negara	225.030.857,82	248.130.380,09	271.357.872,25
b. Antar Provinsi	65.742.078,52	75.645.740,05	103.061.399,72
c. Jasa	14.557.718,60	16.504.607,09	14.998.902,97
7. Impor	249.695.626,20	270.947.541,98	309.958.485,11
a. Antar Negara	132.150.596,83	127.642.061,13	145.753.592,53
b. Antar Provinsi	87.917.885,80	111.155.374,04	128.212.769,84
c. Jasa	29.627.143,57	32.150.106,81	35.992.122,74
Jumlah	862.234.647,55	949.761.264,64	1.070.177.137,57

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

Struktur PDRB menurut penggunaan atas dasar harga berlaku selama periode 2011-2013 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Peningkatan nilai PDRB didukung oleh peningkatan seluruh komponen penggunaan. Nilai

ekspor juga cukup besar namun nilai impornya pun juga hampir seimbang, sehingga secara riil nilai ekspor netto tidak cukup besar. Nilai investasi yang digambarkan oleh besaran nilai PMTB juga mengalami peningkatan.

Pada periode tahun 2011-2013 struktur PDRB dari sisi penggunaan Jawa Barat masih mengandalkan konsumsi rumah tangga dengan rata-rata *share* hampir mencapai 60 persen. Konsumsi rumahtangga merupakan penggerak utama perekonomian Jawa Barat, hal tersebut disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang merupakan pangsa pasar yang potensial. Komponen lainnya juga memberikan peranan yang cukup baik bagi perekonomian regional. Jawa Barat yang merupakan wilayah industrialisasi merupakan daya tarik tersendiri bagi investor baik domestik maupun asing. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya peranan ekspor, tentunya dengan idealisme tanpa ketergantungan bahan baku dan barang modal dari impor.

Grafik 1.
Perkembangan Peranan Komponen PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Barat, Tahun 2011 - 2013



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Investasi fisik yang diindikasikan oleh besaran komponen Pembentukan Modal Bruto (PMTB) memperlihatkan *trend* peningkatan *share* yaitu berkisar antara 17-18 persen. Kegiatan investasi sangat dibutuhkan untuk mendorong berkembangnya sektor riil yang berguna bagi peningkatan nilai tambah perekonomian wilayah, oleh karena itu peranannya dalam perekonomian sangat penting. Stabilitas politik dan keamanan yang baik merupakan faktor penarik bagi investor asing, tentunya etos kerja yang baik, loyal dan disiplin tenaga kerja merupakan kriteria utama. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai stabilisatif memegang peran yang sangat penting terutama dalam menentukan upah buruh minimum.

Peranan ekspor cukup besar yaitu sekitar 36 persen, namun demikian peranan impornya pun cukup besar yaitu mencapai 28,96 persen. Hal tersebut menyebabkan peranan ekspor neto hanya sebesar 7,42 persen. Namun demikian besaran peranan ekspor yang cukup signifikan tersebut mengindikasikan kinerja industry dan tradable sector lainnya yang cukup memuaskan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan sector industry terhadap bahan baku dan barang modal yang berasal dari luar wilayah masih cukup tinggi.

Penjelasan secara mendalam mengenai kontribusi, kinerja serta fenomena yang terjadi sepanjang tahun 2011-2013 pada komponen-komponen pengeluaran dalam perekonomian Jawa Barat akan disajikan pada beberapa subbab di bawah ini.

3.1. Pengeluaran Konsumsi RumahTangga

Pada tahun 2013 tekanan terhadap daya beli masyarakat cukup besar, terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang diantaranya terjadi terhadap pelanggan rumahtangga dengan voltase

1300 VA ke atas. Kenaikan terjadi dalam empat tahap, pertama pada 1 Januari, kedua pada 1 April, ketiga pada 1 Juli dan terakhir pada 1 Oktober 2013. Hal tersebut mengakibatkan tekanan yang melemahkan daya beli, karena tidak hanya dampak langsung yang dirasakan oleh rumahtangga tetapi dampak tidak langsung juga harus ditanggung. Sebagaimana diketahui, kenaikan TTL tidak hanya dialami oleh rumahtangga tetapi oleh konsumen bisnis dan industri, sehingga mengakibatkan harga produk barang dan jasa yang juga meningkat.

Tekanan selanjutnya adalah kenaikan harga BBM untuk premium dan solar dengan peningkatan rata-rata 33,33 persen pada tanggal 22 Juni 2013. Kenaikan tersebut menyebabkan inflasi pada hampir seluruh komoditi barang dan jasa. Inflasi juga terjadi pada beberapa komoditi bumbu, walaupun terjadi pada rentang waktu yang cukup singkat namun sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

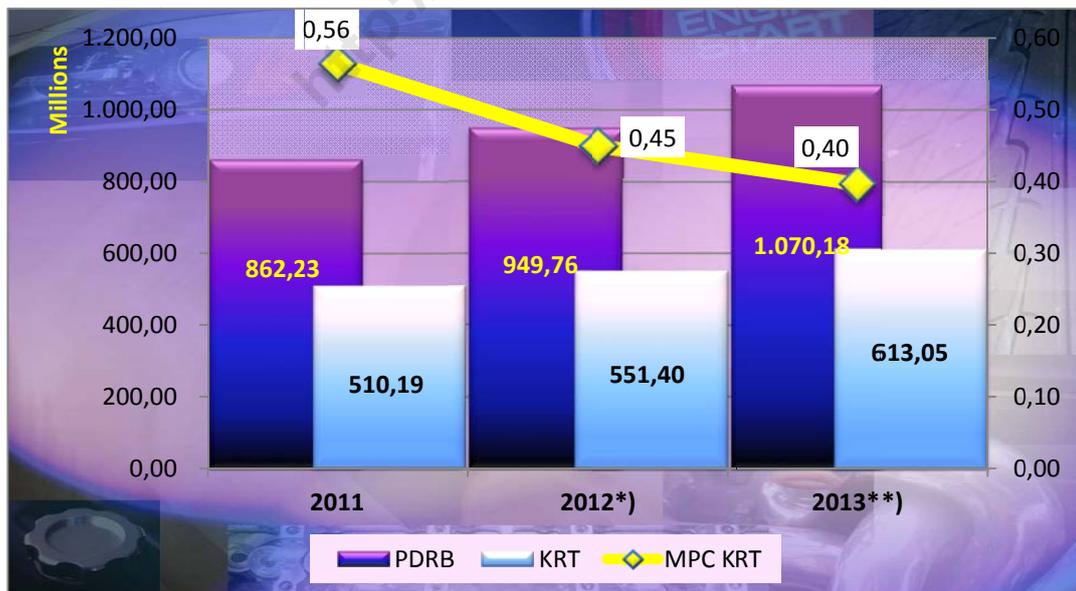
Besarnya jumlah penduduk Jawa Barat merupakan target pasar yang potensial, hal tersebut menyebabkan pengeluaran konsumsi rumahtangga (KRT) memiliki nilai yang cukup dominan dalam perekonomian. Nilai KRT cenderung meningkat selama kurun waktu 2011-2013, yaitu sebesar Rp. 510 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp. 613 triliun pada 2013. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk, perubahan harga (inflasi) juga perubahan pendapatan rumahtangga.

Pada grafik 2. terlihat bahwa peningkatan nilai konsumsi rumahtangga seiring dengan meningkatnya PDRB. Dengan asumsi peningkatan konsumsi dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan regional, dalam hal ini digunakan PDRB sebagai pendekatan pendapatan. Hubungan antara KRT dan PDRB digambarkan oleh besaran rasio MPC (*Marginal Propensity to Consume*). MPC menggambarkan pengaruh peningkatan KRT sebesar satu triliun rupiah terhadap peningkatan PDRB. Pada periode 2011-2013 rasio MPC mengalami pergerakan,

pada tahun 2011 sebesar 0,56 artinya peningkatan KRT sebesar satu triliun rupiah mampu meningkatkan PDRB sebesar 560 miliar rupiah. Besaran MPC pada tahun 2012 mengecil menjadi hanya 0,45 atau setiap kenaikan KRT sebesar satu triliun rupiah hanya mampu meningkatkan PDRB sebesar 450 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2013 besaran rasio MPC kembali menurun menjadi 0,40 artinya pada tahun 2013 peningkatan sebesar 1 triliun KRT menyebabkan meningkatnya PDRB sebesar 400 miliar rupiah. Konsumsi rumahtangga pada tahun 2011 mencapai puncaknya dan memberikan dorongan yang cukup kuat bagi perekonomian. Fenomena meningkatnya konsumsi kelas menengah yang mencapai puncaknya pada tahun 2011 terlihat dari besaran MPC yang cukup tinggi. Namun berikutnya terlihat bahwa daya dorong konsumsi rumahtangga terhadap perekonomian tidak sebaik pada tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 2.

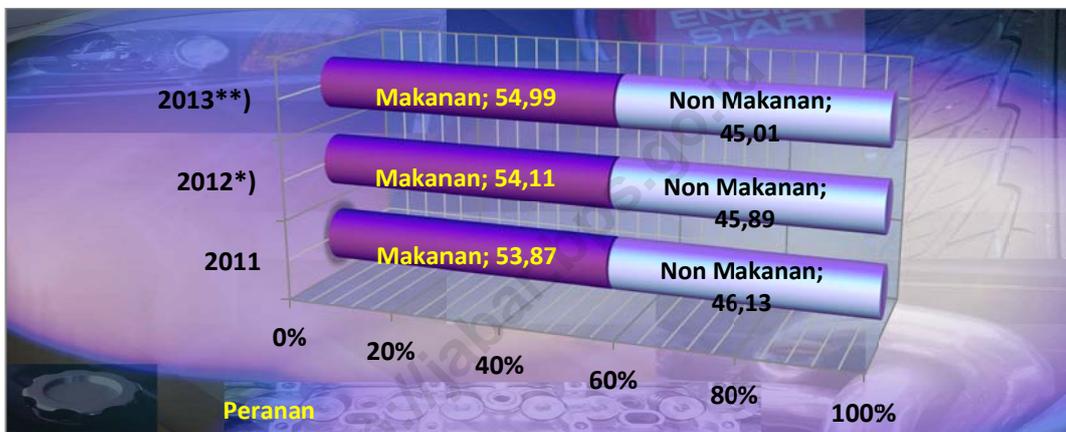
MPC (*Marginal Propensity to Consume*), PDRB dan Konsumsi Rumahtangga Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 Provinsi Jawa Barat (Triliun Rp)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

Jika ditelaah lebih mendalam, peranan konsumsi makanan masih lebih besar daripada konsumsi non makanan. Peranan konsumsi makanan semakin menguat dari sebelumnya sebesar 53,87 persen menjadi 54,99 persen pada tahun 2013. Oleh karena itu peranan konsumsi non-makanan semakin mengecil dari 46,13 persen menjadi 45,01 persen. Masyarakat Jawa Barat masih mengutamakan pada konsumsi makanan.

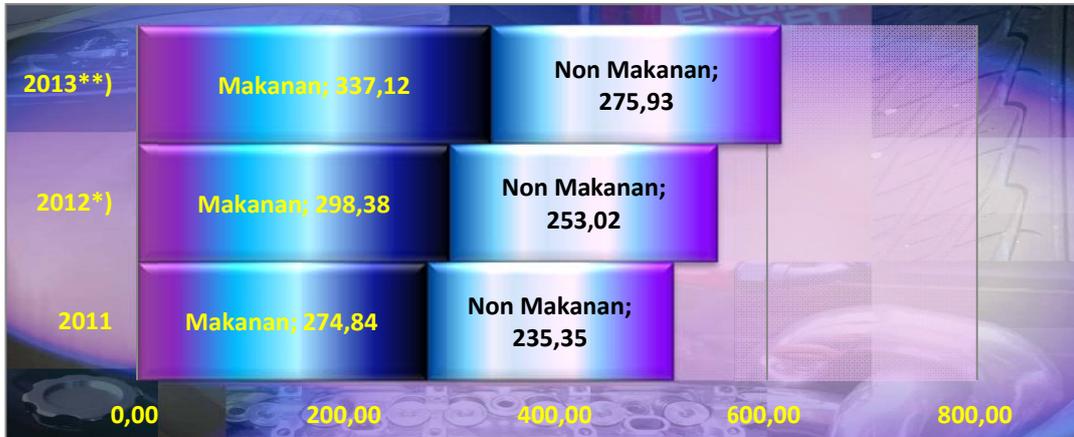
Grafik 3.
Peranan Konsumsi Makanan dan Non Makanan Terhadap Konsumsi Rumah tangga Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

Secara nilai, baik konsumsi makanan maupun konsumsi non makanan selama periode 2011-2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, konsumsi makanan sebesar Rp.274,84 triliun meningkat menjadi Rp.337,12 triliun pada tahun 2011 dan pada tahun 2013 sebesar Rp.337,12 triliun. Demikian halnya dengan konsumsi non makanan juga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 nilai konsumsi non makanan sebesar Rp.235,35 triliun, meningkat menjadi Rp.253,02 triliun pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 nilai konsumsi non makanan sebesar Rp.275,93 triliun.

Grafik 4.
Nilai Konsumsi Makanan dan Non Makanan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011-2013 (Rp triliun)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

Grafik 5. menggambarkan perkembangan KRT perkapita dan PDRB perkapita selama periode tahun 2011-2013. Pada tahun 2011 KRT perkapita sebesar Rp. 11,61 juta, meningkat menjadi Rp. 12,35 juta pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi Rp.13,52 juta. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya PDRB perkapita, pada tahun 2011 PDRB perkapita sebesar Rp.19,67 juta meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp.21,32 juta dan pada tahun 2013 menjadi Rp. 24,02 juta.

Perbandingan peningkatan KRT perkapita dan PDRB perkapita selama periode tahun 2011-2013, terlihat dari laju pertumbuhannya masing-masing seperti terlihat pada Grafik 5. Pada tahun 2011 terlihat bahwa laju pertumbuhan KRT perkapita sebesar 7,20 persen dan PDRB perkapita sebesar 9,78 persen. Pada tahun 2012 kedua indikator tersebut mengalami perlambatan masing-masing menjadi 6,37 persen dan 8,37 persen. Namun pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 9,47 persen untuk laju perkapita, dan 12,68 persen untuk laju PDRB perkapita.

Grafik 5.
KRT perkapita dan LPE perkapita serta Laju Pertumbuhannya
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013



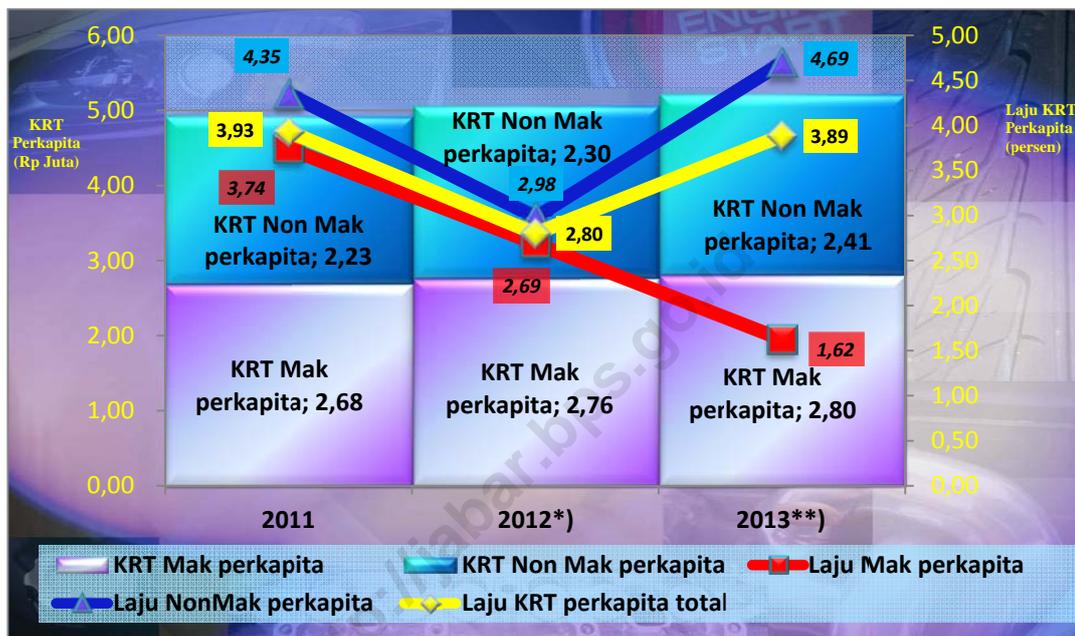
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

Pola laju pertumbuhan KRT perkapita dan PDRB perkapita hampir sama, artinya konsumsi rumah tangga mempunyai dorongan yang signifikan terhadap LPE. Laju pertumbuhan KRT perkapita dan PDRB perkapita cenderung terus melambat, pengaruh krisis global masih berdampak pada perekonomian Jawa Barat. Indikator riil meningkatnya KRT perkapita dengan menghilangkan faktor inflasi atau kenaikan harga adalah, KRT perkapita menurut harga konstan. Grafik berikut menggambarkan semakin meningkatnya KRT perkapita secara riil.

Pada tahun 2011 sebesar Rp. 4,91 juta, dengan rincian KRT Makanan perkapita sebesar Rp.2,68 juta dan KRT Non Makanan perkapita sebesar Rp.2,23 juta. Meningkat menjadi Rp. 5,06 juta pada tahun 2012 (Makanan Rp.2,76 juta dan Non Makanan Rp.2,3 juta) dan kembali meningkat pada tahun 2013 yang sebesar Rp.5,21 juta (Makanan Rp.2,80 juta dan Non Makanan Rp.2,41 juta). Laju pertumbuhannya pun mengalami kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2011 meningkat sebesar 3,93 persen (Makanan 3,74% dan Non Makanan

4,35%), kembali meningkat namun melambat menjadi sebesar 2,80 persen (Makanan 2,65% dan Non Makanan 2,98%) pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 3,89 persen (Makanan 1,62% dan Non Makanan 4,69%).

Grafik 6.
KRT perkapita atas dasar harga konstan (Rp Juta) dan laju pertumbuhannya (persen) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

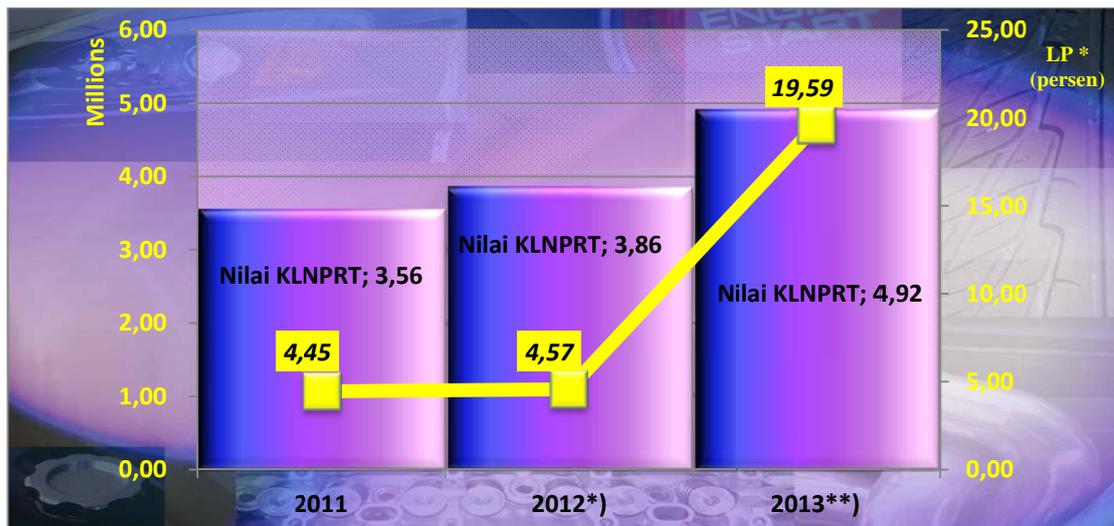
3.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumahtangga (LNPR)

Bagi wilayah yang mengalami bencana alam LNPR tampil sebagai garda terdepan, pada masa pemilu baik yang berskala regional maupun nasional LNPR mengawal suksesnya pesta demokrasi. Nilai Konsumsi Lembaga Non Profit atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp 3,55 triliun, sedangkan pada tahun 2012 nilai konsumsi LNPR sebesar Rp.3,86 triliun dan pada tahun 2013 mulai terjadi peningkatan signifikan yaitu menjadi Rp.4,92 triliun. LNPR merupakan satu entitas legal, yang secara prinsip terlibat dalam kegiatan

layanan atau pemberian jasa kepada rumah tangga (*non-market*). Pengeluaran Konsumsi LNPRT mencakup berbagai pengeluaran oleh lembaga untuk pengadaan barang dan jasa, yang secara prinsip bertujuan untuk biaya operasional atau pengeluaran dalam melayani rumah tangga. Konsumsi LNPRT memiliki besaran nilai yang tidak terlalu signifikan dalam perekonomian, akan tetapi perannya dalam mengawal kehidupan sosial dan politik masyarakat tidak dapat diabaikan.

Laju pertumbuhan konsumsi Lembaga Non Profit pada tahun 2011 meningkat sebesar 4,45 persen, selanjutnya pada tahun 2012 konsumsi LNPRT meningkat sebesar 4,57 persen dan pada tahun 2013 meningkat signifikan sebesar 19,59 persen. Peningkatan tersebut terkait dengan mulai menghangatnya suhu politik di Indonesia secara umum dalam rangka persiapan pemilihan umum pada tahun 2014.

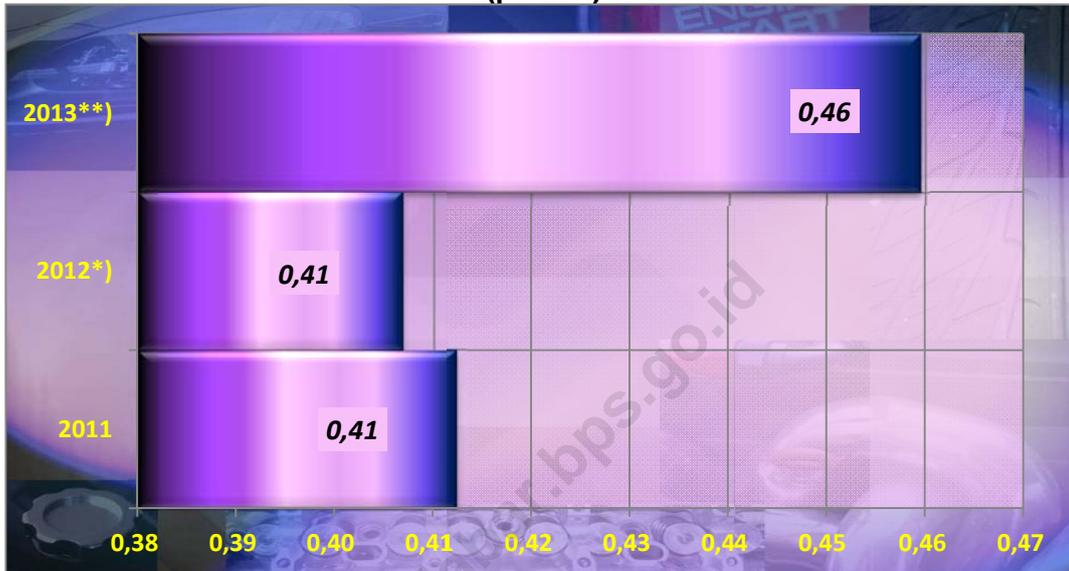
Grafik 7.
Nilai Konsumsi LNPRT (Triliun Rp) dan Laju Pertumbuhan (persen) Tahun 2011-2013 Di Provinsi Jawa Barat



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

Peningkatan signifikan nilai dan laju pertumbuhan konsumsi LNPRT memperkuat peranannya terhadap PDRB. Pada tahun 2011 peranannya hanya sebesar 0,41 persen, pada tahun 2012 pun masih sama, pada saat tahun 2013 peranannya meningkat mencapai 0,46 persen.

Grafik 8.
Peranan Konsumsi LNPRT
Tahun 2011 – 2013 Di Provinsi Jawa Barat
(persen)



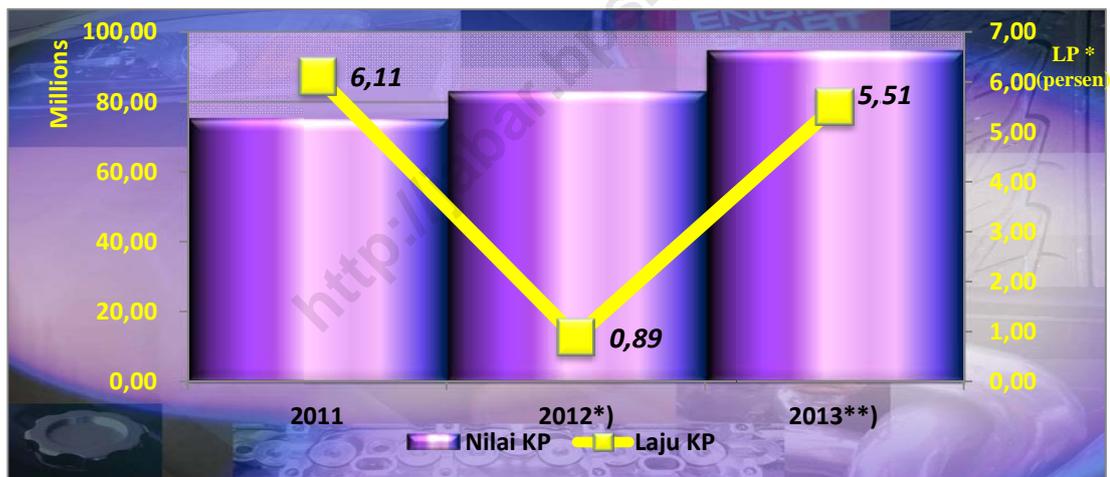
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

3.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Dalam perekonomian peran alokatif pemerintah sangat penting yaitu dalam menyediakan barang social, dimana barang social adalah barang yang tidak menarik bagi masyarakat atau kalangan swasta untuk memproduksi atau menyediakannya karena tidak bisa dijual karena tidak bisa dimiliki atau dinikmati secara pribadi. Barang tersebut diantaranya adalah jalan, jembatan, fasilitas, pusat informasi serta infrastruktur social lainnya. Dalam melaksanakan peran tersebut pemerintah melakukan konsumsi yang digunakan untuk belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja barang modal.

Konsumsi Pemerintah selama periode tiga tahun terakhir 2011-2013 mengalami peningkatan, pada tahun 2011 sebesar Rp 75,17 triliun menjadi Rp 83,11 triliun pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.94,79 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya belanja barang, belanja pegawai serta belanja modal. Laju pertumbuhan Konsumsi Pemerintah secara riil pada tahun 2011 mengalami peningkatan signifikan yaitu sebesar 6,11 persen, kemudian melambat dengan pertumbuhan tipis pada tahun 2012 sebesar 0,89 persen. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan konsumsi pemerintah meningkat sebesar 5,51 persen.

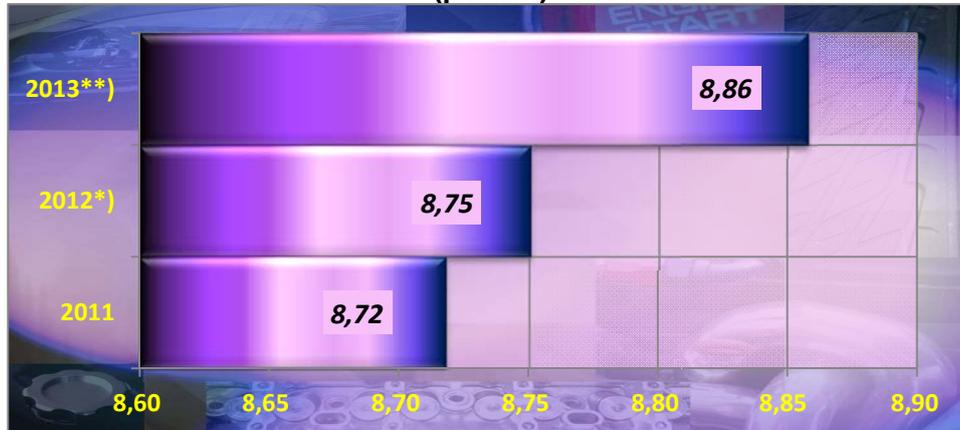
Grafik 9.
Nilai Konsumsi Pemerintah dan Laju Pertumbuhan
Tahun 2011 – 2013 Di Provinsi Jawa Barat



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

Peranan konsumsi pemerintah terus meningkat selama periode tahun 2011-2013. Pada tahun 2011 peranannya sebesar 8,72 persen dan pada tahun 2012 peranannya sedikit meningkat menjadi 8,75 persen. Pada tahun 2013 peranan konsumsi pemerintah sebesar 8,86 persen.

Grafik 10.
Peranan Konsumsi Pemerintah
Tahun 2011 – 2013 Di Provinsi Jawa Barat
(persen)

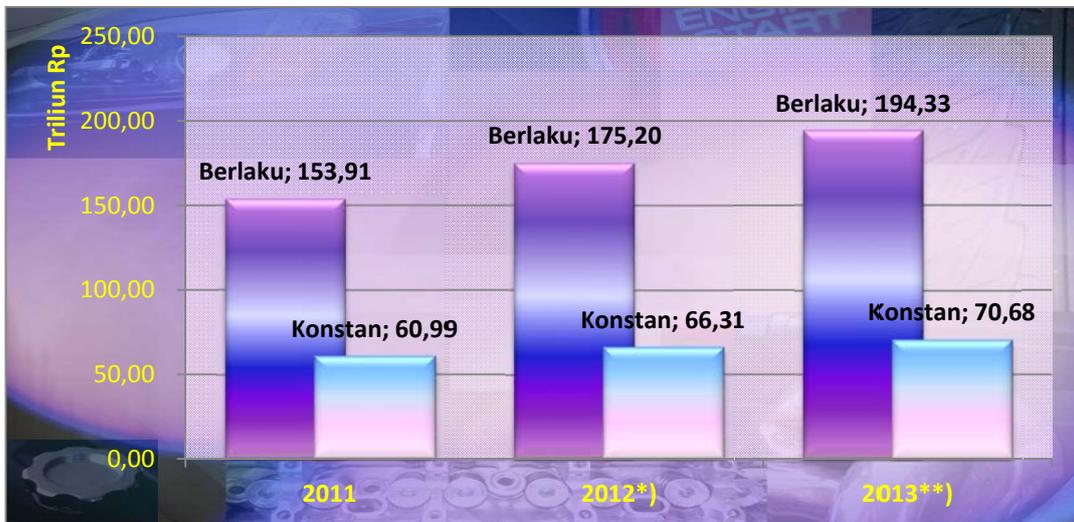


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

3.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Nilai investasi fisik yang tanamkan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dan masih terkandung nilai penyusutan disebut sebagai PMTB. Pelaku pembentukan modal terdiri dari pemerintah, swasta dan rumahtangga, serta BUMN/BUMD yang bergerak pada seluruh sektor lapangan usaha. Atau dengan kata lain PMTB adalah selisih dari capital tahun sebelumnya dengan capital pada tahun berjalan. Adapun kapital diartikan sebagai berbagai bentuk barang modal seperti bangunan, mesin dan perlengkapannya, sarana atau alat transportasi, serta barang modal lainnya yang memberikan kontribusi terhadap kelangsungan suatu proses produksi. Menurut *System of National Accounts (SNA)*, PMTB identik dengan besarnya investasi fisik (*real investment*) yang direalisasikan di suatu negara atau wilayah pada suatu waktu tertentu (*physical domestic investment*). PMTB disebut sebagai *bruto* karena di dalamnya masih terkandung unsur penyusutan, atau nilai barang modal sebelum diperhitungkan nilai penyusutannya.

Grafik 11.
PMTB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan
Konstan Tahun 2011– 2013 (triliun rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Secara nominal, besaran PMTB selama periode tahun 2011-2013 terus mengalami peningkatan dari Rp. 153,91 triliun pada tahun 2011, naik menjadi Rp. 175,20 triliun tahun 2012, dan kemudian meningkat secara signifikan menjadi Rp. 194,33 triliun pada tahun 2013. Demikian pula halnya apabila dilihat secara riil (tanpa pengaruh inflasi), maka komponen PMTB terus mengalami peningkatan selama periode tiga tahun terakhir yaitu dari Rp. 60,99 triliun pada tahun 2011, Rp. 66,31 triliun tahun 2012, dan menjadi Rp. 70,68 triliun pada tahun 2013.

Apabila ditinjau dari sisi kontribusinya, maka komponen PMTB selama periode 2011-2013 mempunyai peranan yang semakin meningkat terhadap total PDRB, yaitu dari 17,43 persen pada tahun 2011, menjadi 17,43 persen tahun 2011, dan kemudian meningkat kembali menjadi 18,50 persen pada tahun 2013. Data tersebut menunjukkan bahwa komponen PMTB selain memiliki peranan yang cukup besar dalam struktur perekonomian di Jawa Barat, juga memperlihatkan kinerja di atas rata-rata komponen lainnya.

Tabel 2.
PDRB adh Berlaku, PMTB, Persentase PMTB
terhadap Total PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013

Uraian	Tahun		
	2011	2011	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PDRB adh Berlaku (Triliun rupiah)	862,23	949,76	1.070,18
2. PMTB (Triliun rupiah)	153,90	175,20	194,33
Persentase PMTB terhadap total PDRB (persen)	17,85	18,45	18,16

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian secara makro, tampak pola pertumbuhan yang sejalan antara laju komponen PMTB dengan LPE pada periode 2011-2013. Setelah mengalami peningkatan kinerja di tahun 2011, yakni dari 9,77 persen, melambat menjadi sebesar 8,72 persen di tahun 2012, kemudian kinerja komponen ini kembali mengalami perlambatan pada tahun 2013, yaitu menjadi sebesar 6,6 persen. Demikian pula dengan LPE, perlambatan juga terjadi di tahun 2012, yaitu dari 6,51 persen menjadi 6,28 persen di tahun 2012. Selanjutnya, sejalan dengan komponen PMTB, kinerja ekonomi makro Jawa Barat kembali mengalami sedikit perlambatan di tahun 2013, yakni menjadi sebesar 6,06 persen.

Grafik 12.
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PMTB
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2013 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Menurut asal investor, investasi yang tercatat pada BKPMDB dibedakan dalam dua jenis, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kendati demikian, Investasi dalam hal ini tidak hanya investasi fisik, tetapi juga mencakup aset lancar dan pembelian tanah yang secara konsep tidak termasuk dalam PMTB pada publikasi ini. Sehingga perlu kehati-hatian dalam membandingkannya dengan komponen PMTB pada PDRB menurut Penggunaan. Secara umum, total nilai realisasi investasi swasta melalui PMA dan PMDN selama periode tahun 2011-2013 menunjukkan peningkatan. Nilai realisasi PMA menurun dari Rp. 41,44 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp. 36,66 triliun pada tahun 2012, namun kembali meningkat menjadi Rp. 67,5 triliun di tahun 2013. Sementara itu, PMDN mengalami kecenderungan yang terus meningkat dari Rp. 7,3 triliun tahun 2011 meningkat signifikan menjadi Rp. 16,02 triliun tahun 2012, dan meningkat kembali menjadi Rp. 26,02 triliun pada tahun 2013. Secara proporsi, realisasi PMA selalu lebih tinggi dibandingkan PMDN. Hal tersebut menggambarkan bahwa iklim usaha di Jawa Barat masih menarik bagi para investor asing. Berbagai promosi, kebijakan serta banyak kemudahan dalam hal regulasi dan perijinan diterapkan oleh pemerintah guna terus menarik minat investor asing.

Grafik 13.
Nilai Realisasi PMA dan PMDN
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013 (Triliun Rp)



Sumber: BKPPMD Provinsi Jawa Barat, 2013

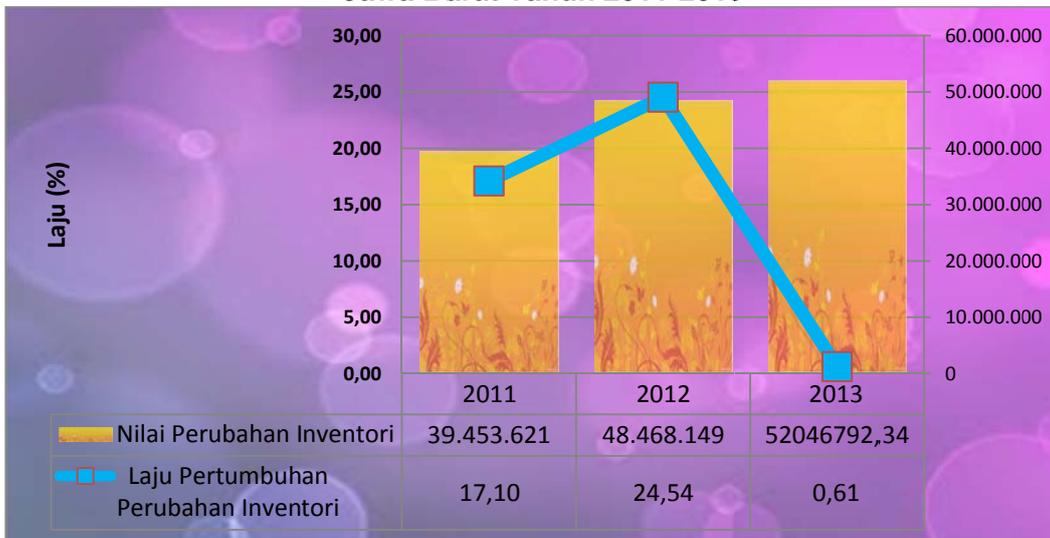
3.5. Perubahan Inventori

Kegiatan investasi merupakan salah satu penggerak aktivitas ekonomi suatu wilayah. Investasi fisik dapat memberikan pengaruh lebih besar bagi pelaku ekonomi karena sifat investasi ini memiliki rentang waktu yang lebih panjang yaitu jangka menengah dan jangka panjang dibandingkan investasi financial sehingga diharapkan nilai tambah dan multiplier effect yang berhasil diciptakan dari kegiatan investasi fisik lebih besar.

Keberlangsungan proses produksi bergantung kepada inventori atau persediaan yang akan bertransformasi menjadi suatu produk lain, selain itu proses produksi juga membutuhkan barang modal serta tenaga kerja. Keberadaan komponen inventori memerlukan kontinuitas untuk menjamin proses produksi dapat berlangsung terus. Upaya menjamin kontinuitas inventori dalam suatu rentang waktu dapat dilakukan dengan mengamati perubahan inventori antar periode. .Perubahan inventori dapat dijadikan indikator peningkatan atau penurunan produksi pada periode selanjutnya, hal ini bergantung dari siklus produksi masing-masing barang.

Kedudukan perubahan inventori dalam perekonomian merupakan bagian dari investasi fisik. Secara konsep inventori merupakan berbagai barang yang dikuasai produsen yang akan diolah lebih lanjut menjadi barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku atau bahan penolong yang akan memiliki nilai ekonomi dan guna yang lebih tinggi, termasuk didalamnya persediaan barang yang masih dalam pengerjaan serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Grafik 14.
Nilai Perubahan Inventori dan Laju Pertumbuhan Perubahan Inventori
Jawa Barat Tahun 2011-2013



Nilai perubahan inventori pada Tahun 2013 telah mencapai Rp 52 triliun bandingkan dengan keadaan enam tahun sebelumnya (2007) yang masih sebesar Rp 18,26 triliun atau mengalami peningkatan signifikan sebesar 184,78 persen. Selama periode 2011-2012 terjadi peningkatan perubahan inventori secara berturut-turut dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 24,54 persen. Pada tahun 2013 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,61 persen seperti terlihat pada Grafik 15.

Grafik 15.
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Perubahan Inventori
Jawa Barat Tahun 2011-2013

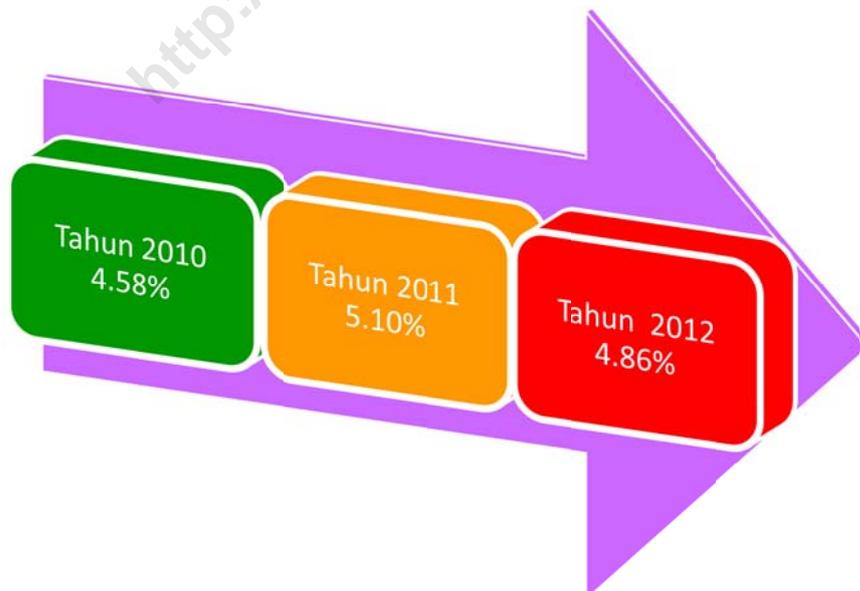


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Inventori secara langsung berpengaruh terhadap aktivitas produksi sehingga pergerakannya secara langsung dapat diamati terhadap kinerja sektor real dan pada akhirnya mempengaruhi total penciptaan nilai tambah. Apabila dicermati laju pertumbuhan perubahan yang melambat pada tahun 2013 sejalan dengan laju penciptaan nilai tambah total yang juga mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode tahun 2012.

Kontribusi komponen perubahan inventori terhadap perekonomian selama 2011-2013 berkisar pada angka 4-5 persen terhadap total PDRB Jawa Barat, tercatat kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 5,10 persen kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2013 sebesar 4,86 persen. Peningkatan kontribusi perubahan inventory ini sangat esensial dalam perekonomian secara makro karena berindikasi positif bagi peningkatan produksi.

Grafik 16.
Peranan Perubahan Inventori Terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2011-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2014

Fenomena perkembangan perubahan inventori di Jawa Barat pada periode 2011-2013 tampak sejalan dengan pertumbuhan impor bahan baku pada periode yang sama, dimana terus mengalami pertumbuhan positif dan peningkatan porsi dibandingkan dengan impor barang untuk keperluan konsumsi dan barang modal.

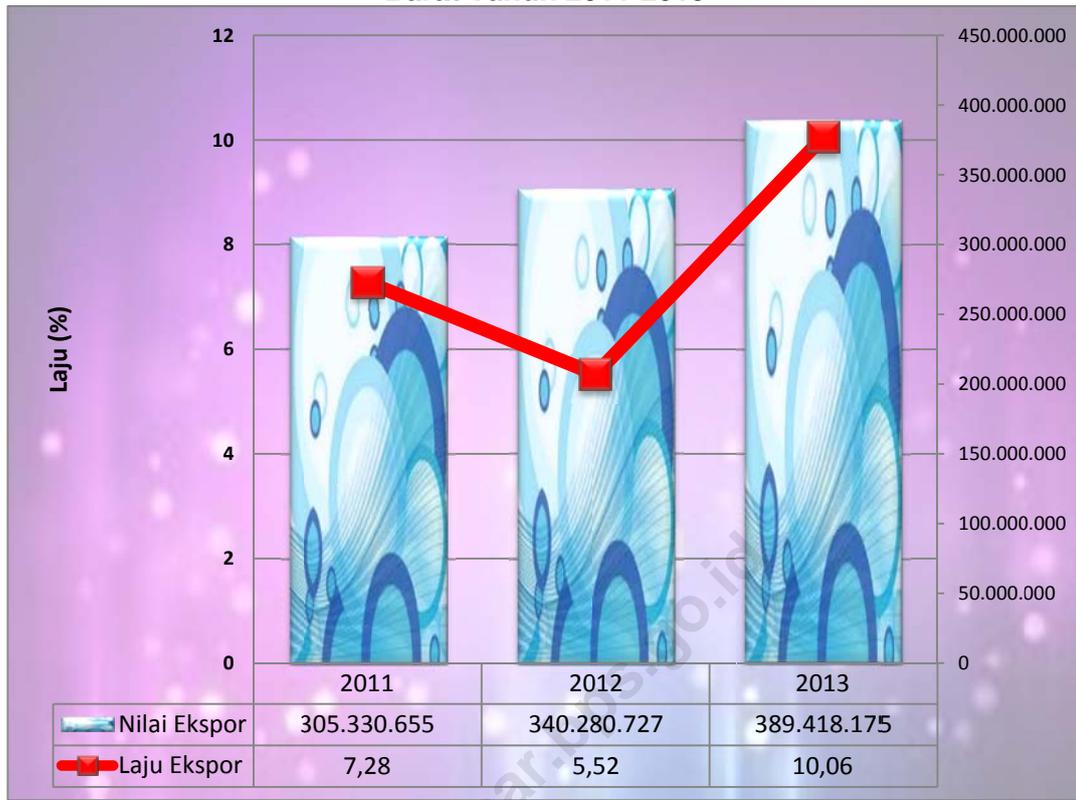
3.6. Ekspor dan Impor

3.6.1. Ekspor

Perlambatan ekonomi global masih berlangsung hingga akhir tahun 2012 sehingga berpengaruh secara langsung terhadap kinerja ekspor Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat, hal ini berlangsung hingga lebih dari paruh pertama tahun 2013. Puncak kelesuan ekspor terlihat pada triwulan tiga tahun 2013 dimana komponen ekspor mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,22 persen terhadap triwulan dua, meski demikian kinerja ekspor secara keseluruhan selama tahun 2013 mencatatkan peningkatan sebesar 10,06 persen jika dibandingkan dengan keadaan di tahun 2012 yang hanya tumbuh sebesar 5,52 persen.

Pertumbuhan komponen ekspor sepanjang tahun 2013 ini didorong oleh meningkatnya permintaan ekspor dengan berangsur memulihnya perekonomian global terutama di Amerika Serikat. Hal ini sejalan dengan kontribusi Amerika Serikat selama tiga tahun berturut-turut (2010-2012) sebagai negara dengan permintaan ekspor terbesar wilayah Jawa Barat. Selain itu merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap USD pada bulan-bulan akhir tahun 2013 juga berkontribusi, dimana puncaknya terjadi pada bulan Desember 2013. Secara nominal hal ini menguntungkan eksportir yang bertransaksi dengan USD. Komponen ekspor sepanjang tahun 2013 dapat mencatatkan nilai sebesar Rp 389 triliun.

Grafik 17.
PDRB Ekspor (Juta Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekspor (Persen) Jawa Barat Tahun 2011-2013

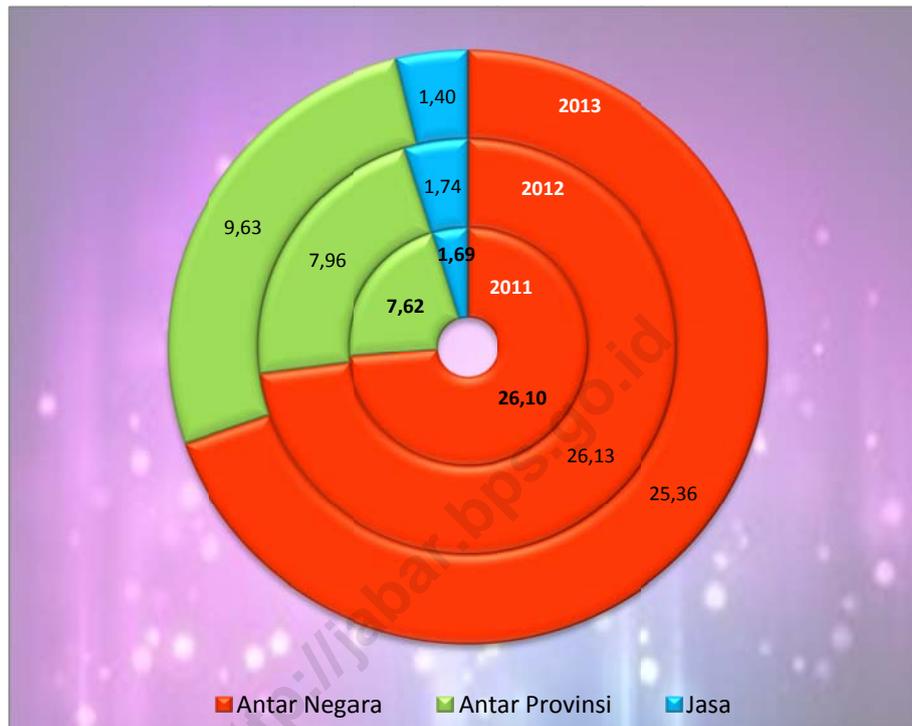


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2014

Penghitungan komponen ekspor dalam PDRB menurut pengeluaran mencakup : 1) ekspor antar negara, 2) ekspor antar provinsi dan 3) ekspor jasa. Kontribusi terbesar ekspor Jawa Barat adalah pada ekspor antar Negara, dimana selama tiga tahun terakhir (2011-2013) tercatat dengan porsi diatas 25 persen, disusul oleh ekspor antar provinsi dan yang terkecil adalah kontribusi ekspor jasa. Sementara itu kontribusi ekspor antar negara di Jawa Barat selama tiga tahun 2011 - 2013 memiliki kecenderungan yang semakin mengecil, hal ini karena permintaan ekspor yang mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi global. Di sisi lain, kontribusi ekspor antar provinsi selama periode 2011-2013 berangsur mengalami peningkatan yang signifikan tercatat pada tahun 2013 memiliki

kontribusi sebesar 9,63 persen atau kontribusi terbesar selama enam tahun terakhir (2008-2013). Perlambatan ekonomi global ini tampaknya menjadi peluang bagi produsen untuk menyerap pasar domestik.

Grafik 18.
Peranan Komponen Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2011-2013 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

Kontribusi komponen ekspor terhadap perekonomian Jawa Barat secara berangsur menunjukkan peningkatan setelah anjlok pada besaran di bawah 36 persen di tahun 2009 sebagai imbas krisis finansial global dengan penyebab utama *subprime mortgage* yang terjadi Amerika Serikat. Sementara itu kontribusi komponen ekspor pada kondisi periode sebelum krisis finansial besarnya masih di atas 40 persen. Tercatat pada tahun 2013 kontribusi komponen ekspor berhasil meningkat pada besaran di atas 36 persen setelah selama lima tahun (2009-2012) berada pada besaran di bawah 36 persen.

Tabel 3.
Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekspor dan Impor Terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2011-2013

Komponen	Peranan (%)			Laju Pertumbuhan (%)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
[1] Ekspor	[2] 35.41	[3] 35.83	[4] 36.39	[5] 7.28	[6] 5.52	[7] 10.06
Impor	28.96	28.53	28.96	11.65	3.42	12.65
Ekspor Netto	6.45	7.30	7.42	-3.19	11.33	3.43

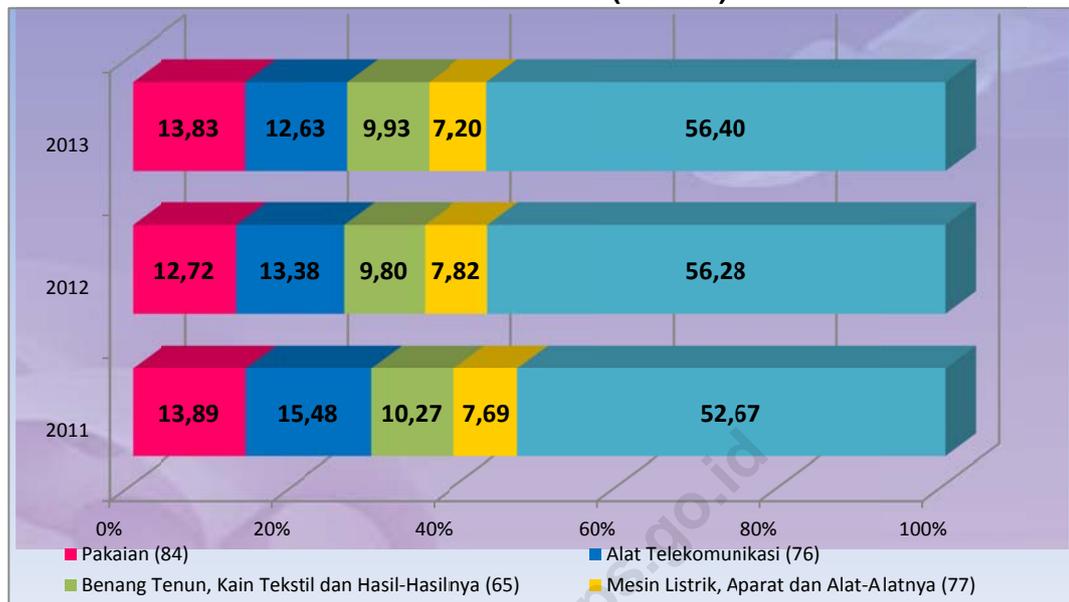
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2014

Kinerja ekspor dalam suatu perekonomian tidak dapat secara objektif tergambar hanya dengan mengamati komponen ekspor itu sendiri karena terdapat komponen impor yang menjadi pengurang ekspor. Ekspor netto merupakan pengurangan komponen ekspor terhadap impor dapat memotret kinerja ekspor dalam suatu perekonomian, sehingga secara langsung komponen ini dapat menjadi indikator kinerja ekspor dalam perekonomian. Kontribusi ekspor netto dalam perekonomian Jawa Barat secara bertahap mengalami peningkatan tipis, dimana pada tahun 2013 tercatat hanya meningkat sebesar 0,12 persen. Hal ini menjelaskan bahwa sebenarnya kenaikan kontribusi komponen ekspor menjadi tidak signifikan ketika kontribusi komponennya meningkat lebih besar.

Kinerja ekspor tahun 2013 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 10,06 persen dibandingkan tahun 2012, meskipun demikian peningkatan signifikan tersebut disertai dengan peningkatan pertumbuhan komponen impor yang lebih tinggi di tahun 2013 sebesar 12,65 persen. Fakta ini menyebabkan tergerusnya kinerja ekspor netto di tahun 2013 atau mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 3,43 persen. Keadaan ini juga terjadi di tahun 2011 dimana ekspor netto mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 3,19 akibat kenaikan laju komponen impor sebesar 11,65 persen, sementara komponen ekspor tidak dapat mengimbangi dengan pertumbuhan hanya sebesar 7,28 persen. Hal ini

sebagai imbas dari krisis zona Eropayang melemahkan permintaan ekspor Jawa Barat.

Grafik 19.
Peranan Komoditas Ekspor Non Migas Utama Jawa Barat
Tahun 2011-2013 (Persen)



Sumber : Bank Indonesia, 2014

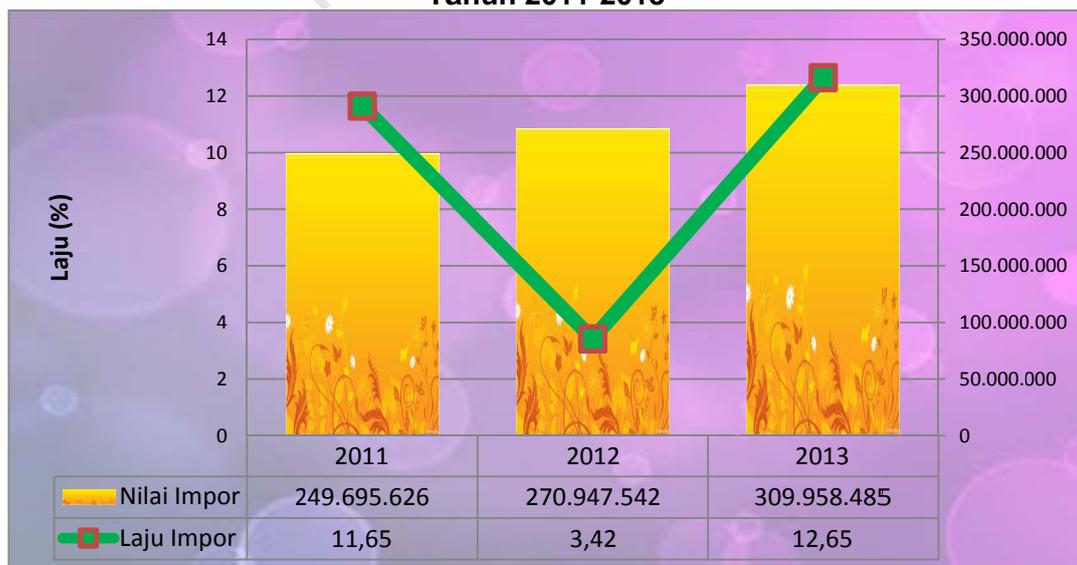
Empat komoditas ekspor utama Jawa Barat ditinjau dari peranannya terhadap nilai ekspor secara keseluruhan terdiri dari : 1) Pakaian, 2) Alat Telekomunikasi , 3) Benang Tenun, Kain Tekstil dan hasil-hasilnya dan 4) Mesin Listrik, Aparat dan alat-alatnya seperti terlihat pada Grafik 20. Kontribusi terbesar komoditas ekspor Jawa Barat tahun 2013 terdapat pada komoditas pakaian sebesar 13,83 persen menggeser posisi komoditas alat telekomunikasi sebagai contributor ekspor terbesar pada dua tahun sebelumnya (2011-2012). Komoditas Alat Telekomunikasi mengalami penurunan dengan kontribusi sebesar 12,63 persen. Sejalan dengan peningkatan kontribusi komoditas Pakaian maka komoditas Benang Tenun, Kain Tekstil dan hasil-hasilnya mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 9,93 persen, sedangkan komoditas Mesin Listrik, Aparat dan alat-alatnya hanya mengalami penurunan tipis dengan kontribusi 7,20 persen.

3.6.2. Impor

Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan pangsa pasar yang potensial bagi konsumsi barang dan jasa, sehingga fakta ini menjadikan Indonesia sebagai sasaran aliran barang impor terutama dari negara China sebagai negara pengimpor terbesar di wilayah Jawa Barat. China mengkonsentrasikan pasar salah satunya di Asia sebagai akibat kelesuan pasar di Amerika Serikat dan Eropa yang mengalami perlambatan ekonomi.

Aliran impor yang deras akan mengancam stabilitas neraca perdagangan menjadi defisit karena jurang antara ekspor dan impor makin dalam, kinerja ekspor tidak dapat mengimbangi kinerja impor yang semakin meningkat sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan instabilitas perekonomian. Salah satu langkah yang telah direalisasi Pemerintah untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan pembatasan impor komoditas hortikultura.

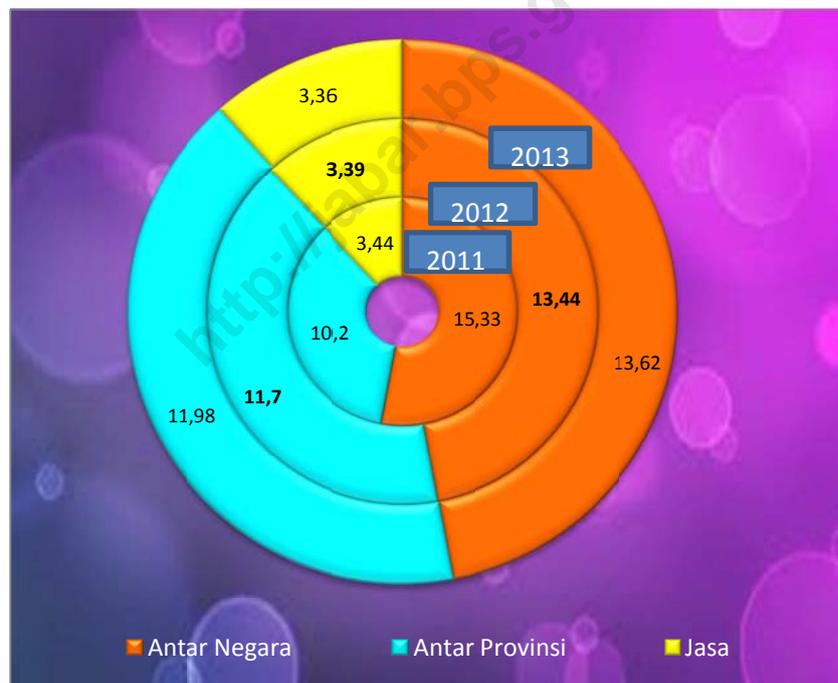
Grafik 20.
Nilai Impor (Juta Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Impor (Persen) Jawa Barat Tahun 2011-2013



Sumber : BPS Jawa Barat, 2014

Laju komponen impor menunjukkan peningkatan pada tahun 2013 sebesar 12,65 persen, setelah melambat pada tahun 2012 sebesar 3,42 persen, tercatat nilai total impor Jawa Barat pada tahun 2013 mencapai Rp 310 triliun. Peningkatan laju komponen impor ini tidak terlepas dari porsi terbesar impor di Jawa Barat yang merupakan impor bahan baku khususnya untuk keperluan industri. Hal ini tergambar dari porsi impor bahan baku yang terus menerus mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2012 sebesar 78,84 persen. Dengan demikian, Impor bahan baku ini dapat digunakan sebagai indikator kinerja sektor industri di Jawa Barat.

Grafik 21.
Peranan Komponen Impor Barang dan Jasa terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2011-2013 (Persen)



Sumber : BPS Jawa Barat, 2014

Apabila ditinjau dari komposisi komponen impor dalam PDRB Menurut Pengeluaran, pada periode 2011-2013 terlihat impor antar negara memiliki porsi terbesar, kemudian disusul oleh impor antar provinsi dan impor jasa seperti yang

terlihat dalam Grafik 23. Komponen impor antar negara meski memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian yaitu pada besaran di atas 13 persen pada dua tahun terakhir (2012-2013), namun tidak terpaut jauh dengan besaran impor antar daerah pada periode yang sama, dengan kontribusi di atas 11 persen. Kondisi tersebut berbeda dengan ekspor, dimana ekspor antar negara sangat mendominasi komponen ekspor secara agregat. Sementara untuk impor jasa pada kurun 2011-2013 relatif stabil dengan kontribusi di atas tiga persen

Komoditas impor utama Jawa Barat ditinjau dari peranannya terhadap nilai impor secara keseluruhan selama kurun 2011-2013 terdiri dari 1) Mesin, Listrik, Aparat dan alat-alatnya 2) Barang Tenun, Kain Tekstil dan hasilnya 3) Alat Telekomunikasi dan 4) Mesin Industri Tertentu/Khusus. Komoditas impor yang mengalami peningkatan peranan pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 adalah 1) Mesin, Listrik, Aparat dan alat-alatnya 2) Barang Tenun, Kain Tekstil dan hasilnya dan 3) Alat Telekomunikasi. Sementara peranan impor Mesin Industri Tertentu/Khusus selama kurun tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan.

Grafik 22.
Peranan Komoditas Impor Non Migas Utama Jawa Barat
Tahun 2011-2013



Sumber : BPS Jawa Barat, 2014

3.7. Sumber Laju Pertumbuhan (*Source of Growth/SOG*)

Andil masing-masing komponen PDRB terhadap total laju pertumbuhan ekonomi (LPE) digambarkan oleh besaran Sumber Laju Pertumbuhan (*Source of Growth/SOG*). Pada tahun 2013 seluruh komponen pengeluaran yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non pemerintah, konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan inventori dan ekspor memberikan peranan positif bagi LPE di Jawa Barat.

Konsumsi rumah tangga dalam kurun tiga tahun terakhir (2011-2013) memberikan andil positif dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sejalan dengan kontribusi komponen ini yang memiliki porsi terbesar dalam PDRB. Sumbangan komponen konsumsi rumah tangga tahun 2013 sebesar 2,40 persen lebih kecil dibandingkan tahun 2012 yang memberikan andil sebesar 2,82 persen.

Andil positif diberikan komponen konsumsi lembaga non profit terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode 2011-2013, tercatat pada tahun 2013 andil komponen ini meningkat menjadi sebesar 0,11 persen setelah pada tahun 2012 mengalami andil positif yaitu sebesar 0,02 persen dimana besaran ini stagnan dari andil pada tahun 2011. Belanja LNPRT sebagai persiapan dan konsolidasi dari partai politik menjelang Pemilu merupakan penyebab meningkatnya andil konsumsi lembaga non profit di tahun 2013.

Selama periode 2011-2013 andil konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menunjukkan nilai positif. Pada tahun 2011, komponen ini memberikan andil positif sebesar 0,36 persen, pada tahun 2012 komponen ini sangat kecil memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu hanya sebesar 0,05 persen. Pada tahun 2013 andil komponen ini merangkak kembali menjadi sebesar 0,30 persen.

Tabel 4.
Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011-2013

No.	Uraian	2011*)	2012**)	2013***)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Konsumsi Rumah Tangga	3.67	2.82	2.4
2	Konsumsi Lembaga Non Profit	0.02	0.02	0.11
3	Konsumsi Pemerintah	0.36	0.05	0.3
4	PMTB	1.68	1.55	1.2
5	Perubahan Inventori	0.58	0.91	0.03
6	Ekspor	3.24	2.47	4.47
7	Impor	3.65	1.12	4.05
	Jumlah	6.51	6.28	6.06

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Andil positif diberikan komponen PMTB terhadap laju pertumbuhan ekonomi selama periode tiga tahun (2011-2013) dengan besaran di atas satu persen. Hal ini merupakan perkembangan yang positif bagi perekonomian Jawa Barat yaitu merupakan indikasi peranan investasi fisik yang semakin besar dalam perekonomian di Jawa Barat untuk menggerakkan sektor riil. Tercatat pada tahun 2013 komponen ini memberikan andil sebesar 1,2 persen, menurun dari andil pada tahun 2012 sebesar 1,55 persen

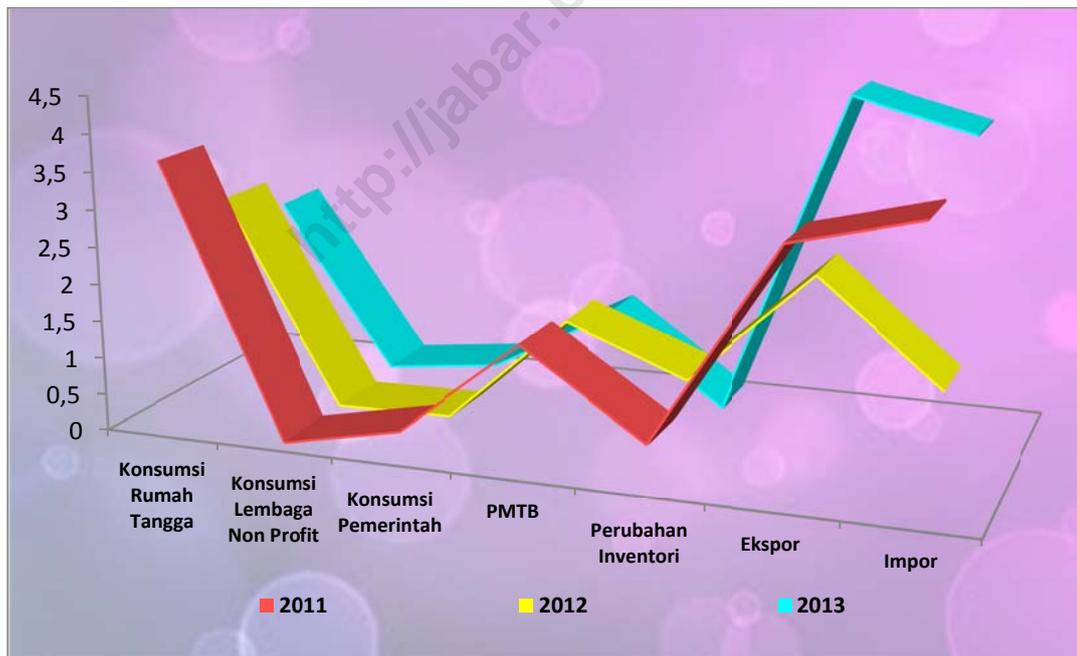
Selama periode 2011-2013 andil komponen perubahan inventori menunjukkan angka positif, meski demikian pada tahun 2013 andil yang diberikan sangat kecil yaitu sebesar 0,03 persen dibandingkan dengan dua periode sebelumnya yaitu sebesar 0,58 persen pada tahun 2011 dan 0,91 persen pada tahun 2012. Sumbangan komponen perubahan inventori yang sangat kecil terhadap LPE tahun 2013 salah satunya disebabkan oleh kelesuan permintaan global terhadap sektor riil di wilayah Jawa Barat.

Komponen ekspor barang dan jasa selama periode 2011-2013 juga memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,

tercatat peningkatan andil terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 4,47 persen, sementara itu pada tahun 2012 komponen ekspor hanya memberikan andil 2,47 persen seiring dengan melemahnya permintaan dari negara tujuan ekspor akibat krisis global.

Sementara itu komponen impor yang merupakan faktor pengurang ekonomi, dimana andil positif komponen impor berarti menjadi pengurang bagi LPE. Tercatat sumbangan negatif komponen impor pada tahun 2012 sebesar 1,12 persen, kemudian andil negatif impor terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 meningkat signifikan menjadi sebesar 4,05 persen yang sekaligus merupakan andil terbesar selama tiga tahun terakhir (2011-2013).

Grafik 23.
Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011-2013 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

3.8. Kesimpulan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat yang dihitung atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp 946,86 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp. 364,41 triliun. Kinerja Perekonomian Jawa Barat yang dicerminkan oleh LPE mengalami pertumbuhan sebesar 6,21 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, LPE tahun 2013 mengalami perlambatan, dimana perekonomian tahun 2011 tumbuh sebesar 6,48 persen. Melambatnya perekonomian Jawa Barat Tahun 2013 tersebut merupakan dampak dari krisis yang terjadi di zona eropa yang menyebabkan melambatnya kinerja ekspor Jawa Barat.

Selama kurun tiga tahun (2011-2013), pola pengeluaran di Jawa Barat masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, dengan *trend* yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 porsi komponen Konsumsi rumahtangga tercatat sebesar 60,68 persen dan mengalami penurunan menjadi 58,23 persen di tahun 2013. Kendati demikian, secara absolut nilai konsumsi rumahtangga dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami kenaikan cukup relatif tinggi, ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kenaikan harga barang dan jasa. Dari sisi kuantitas, besaran konsumsi rumahtangga tahun 2013 yang dihitung atas dasar harga konstan telah mencapai Rp. 225,49 triliun, atau mengalami peningkatan kuantitas sebesar 4,49 persen dari tahun 2011 yang mencapai Rp. 215,80 triliun.

Nilai konsumsi Lembaga non profit yang melayani rumahtangga (LNPR) relatif sangat kecil dibandingkan dengan komponen lainnya, dimana pada tahun 2013 nilai komponen ini sebesar Rp. 3,86 triliun, atau dengan porsi yang hanya sebesar 0,41 persen terhadap PDRB di Jawa Barat. Dari sisi kuantitas komponen pengeluaran lembaga non profit yang melayani rumahtangga tumbuh sebesar

4,57 persen, atau dari nilai pengeluaran atas dasar harga konstan sebesar Rp.1,88 triliun di tahun 2011 menjadi Rp. 1,96 triliun.

Setelah mengalami peningkatan share di tahun 2011, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan porsi terhadap PDRB, yakni dari 8,90 persen ditahun 2011 menjadi 8,78 persen ditahun 2013. Dari sisi kuantitas, pertumbuhan komponen Konsumsi Pemerintah pada tahun 2013 mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari pertumbuhan sebesar 6,48 ditahun 2011 menjadi hanya sebesar 0,01 persen.

Secara nominal, besaran PMTB selama periode tahun 2011-2013 terus mengalami peningkatan, yakni dari Rp. 134,50 triliun rupiah pada tahun 2011 menjadi Rp. 175,20 triliun rupiah tahun 2013. Sementara itu, apabila dilihat secara riil (tanpa pengaruh inflasi), kuantitas komponen PMTB juga terus mengalami pertumbuhan positif selama periode yang sama. Laju Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011, yakni sebesar 9,77 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan kuantitas PMTB mengalami perlambatan, namun dengan level yang masih relatif tinggi, yaitu sebesar 8,72 persen. Dibandingkan dengan komponen konsumsi dan ekspor, pertumbuhan komponen PMTB relatif lebih tinggi selama periode 2011-2012. Kondisi tersebut menyebabkan share komponen PMTB terus mengalami peningkatan pada periode tersebut, yakni dari 17,43 persen menjadi 18,50 persen. Dari sisi jenis barang, Proporsi terbesar PMTB di Jawa Barat selama kurun waktu 2011-2013 masih didominasi oleh bangunan yang diperkirakan memberikan kontribusi di atas 50 persen dari total PMTB, kemudian disusul mesin, transportasi, dan perlengkapan lainnya.

Seperti PMTB, laju pertumbuhan kuantitas perubahan inventori selama periode 2011-2012 relatif tinggi dibanding komponen-komponen lainnya. Pada tahun 2011 kuantitas perubahan inventori mengalami pertumbuhan sebesar 17,10

persen, dan meningkat cukup signifikan pada tahun berikutnya dengan laju pertumbuhan sebesar 24,54 persen. Sementara itu, sampai dengan tahun 2013 kontribusi perubahan inventori mencapai 5,12 persen terhadap PDRB, atau terus mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Selanjutnya dari sisi neraca perdagangan yang tergambar dari komponen ekspor impor, secara nominal, pada kurun waktu 2011-2013, posisi Jawa Barat mengalami peningkatan surplus perdagangan, yakni dengan ekspor netto sebesar Rp. 45,46 triliun, dimana tahun sebelum sebesar Rp. 40,84 triliun. Kendati demikian, peningkatan ekspor netto Jawa Barat pada tahun 2013 tersebut bukan didongkrak oleh kenaikan kinerja ekspor Jawa Barat, namun lebih disebabkan oleh melambatnya kinerja impor akibat melemahnya perekonomian global yang mengakibatkan menurunnya produksi negara-negara exportir ke Indonesia khususnya Jawa Barat. Secara kuantitas, pada tahun 2013 pertumbuhan ekspor Jawa Barat mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dengan laju pertumbuhan 5,52 persen setelah tumbuh sebesar 7,28 persen pada tahun 2011. Demikian pula dengan kuantitas impor yang merupakan komponen pengurang, juga mengalami perlambatan pertumbuhan, bahkan dengan tingkat perlambatan yang lebih besar. Pada tahun 2011 kuantitas impor di Propinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan sangat tinggi, yakni sebesar 11,65 persen, namun demikian, krisis zona Eropa yang terjadi ditahun 2011 telah menyebabkan perlambatan kuantitas impor yang cukup signifikan di Propinsi Jawa Barat, yakni dengan pertumbuhan menjadi sebesar 3,42 persen.

Selama periode 2011-2012 perekonomian Jawa Barat masih tampak di drive oleh komponen konsumsi rumahtangga. Hal ini tampak dari andil komponen ini terhadap LPE tercatat yang tertinggi pada periode tersebut. Dari LPE sebesar 6,21 persen ditahun 2013, andil konsumsi rumahtangga mencapai 2,83 persen. Sumber pertumbuhan lain yang cukup dominan adalah ekspor dengan andil

terhadap LPE sebesar 2,47 persen pada tahun 2013. Selanjutnya komponen PMTB dan perubahan inventori masing-masing memberikan andil 1,55 persen dan 0,91 persen. Kemudian andil pengeluaran LNPRT terhadap LPE tercatat sebesar 0,02 persen. Sementara itu, pada tahun 2013 komponen konsumsi pemerintah hampir tidak memberikan andil terhadap LPE di Jawa Barat pada tahun 2013 setelah di tahun sebelumnya memberikan andil sebesar 0,38 persen dari LPE sebesar 6,48 persen.

<http://jabar.bps.go.id>

Tabel-tabel Pokok
PDRB Provinsi Jawa Barat
Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013

<http://jabar.bps.go.id>

Lampiran 1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013
(Juta Rupiah)

Uraian	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	510.187.921,23	551.404.348,16	613.048.304,04
a. Makanan	274.837.301,85	298.382.700,46	337.117.572,71
b. Bukan Makanan	235.350.619,38	253.021.647,70	275.930.731,33
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	3.556.229,43	3.864.741,76	4.917.907,97
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	75.173.760,19	83.110.606,89	94.796.047,52
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	153.905.249,49	175.201.065,80	194.329.431,57
5. Perubahan Inventori	39.453.621,17	48.468.148,56	52.046.792,34
Diskrepansi	24.322.837,30	18.379.168,22	31.578.964,30
6. Ekspor :	305.330.654,95	340.280.727,23	389.418.174,95
a. Antar Negara	225.030.857,82	248.130.380,09	271.357.872,25
b. Antar Provinsi	65.742.078,52	75.645.740,05	103.061.399,72
c. Jasa	14.557.718,60	16.504.607,09	14.998.902,97
7. Impor :	249.695.626,20	270.947.541,98	309.958.485,11
a. Antar Negara	132.150.596,83	127.642.061,13	145.753.592,53
b. Antar Provinsi	87.917.885,80	111.155.374,04	128.212.769,84
c. Jasa	29.627.143,57	32.150.106,81	35.992.122,74
P D R B	862.234.647,55	949.761.264,64	1.070.177.137,57

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 2.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013
(Juta Rupiah)

Uraian	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	215.796.706,66	225.491.313,31	234.252.831,19
a. Makanan	117.935.797,66	123.051.712,40	127.003.708,85
b. Bukan Makanan	97.860.908,99	102.439.600,91	107.249.122,34
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	1.876.056,60	1.961.737,33	2.345.995,71
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19.930.948,69	20.108.449,25	21.215.963,97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	60.989.348,25	66.306.963,63	70.681.381,44
5. Perubahan Inventori	12.714.889,20	15.835.429,80	15.932.541,48
Diskrepansi	-8.950.391,73	-10.414.847,63	-4.610.916,35
6. Ekspor :	153.628.213,90	162.112.646,91	178.425.800,00
a. Antar Negara	123.672.605,08	128.644.371,26	136.849.078,00
b. Antar Provinsi	24.589.691,46	27.437.565,04	36.329.755,03
c. Jasa	5.365.917,36	6.030.710,61	5.246.966,97
7. Impor :	112.792.212,73	116.649.289,44	131.404.757,75
a. Antar Negara	59.562.462,22	56.561.354,15	62.016.808,26
b. Antar Provinsi	39.938.069,31	48.524.656,57	56.894.007,85
c. Jasa	13.291.681,21	11.563.278,72	12.493.941,64
P D R B	343.193.558,83	364.752.403,17	386.838.839,69

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 3.
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013
(Persen)

Uraian	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,17	58,06	57,28
a. Makanan	31,88	31,42	31,50
b. Bukan Makanan	27,30	26,64	25,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	0,41	0,41	0,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,72	8,75	8,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	17,85	18,45	18,16
5. Perubahan Inventori	4,58	5,10	4,86
Diskrepansi	2,82	1,94	2,95
6. Ekspor :	35,41	35,83	36,39
a. Antar Negara	26,10	26,13	25,36
b. Antar Provinsi	7,62	7,96	9,63
c. Jasa	1,69	1,74	1,40
7. Impor :	28,96	28,53	28,96
a. Antar Negara	15,33	13,44	13,62
b. Antar Provinsi	10,20	11,70	11,98
c. Jasa	3,44	3,39	3,36
P D R B	100,00	100,00	100,00

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 4.
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013
(Persen)

Uraian	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,88	61,82	60,56
a. Makanan	34,36	33,74	32,83
b. Bukan Makanan	28,51	28,08	27,72
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	0,55	0,54	0,61
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,81	5,51	5,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	17,77	18,18	18,27
5. Perubahan Inventori	3,70	4,34	4,12
Diskrepansi	-2,61	-2,86	-1,19
6. Ekspor :	44,76	44,44	46,12
a. Antar Negara	36,04	35,27	35,38
b. Antar Provinsi	25,62	30,47	33,14
c. Jasa	1,56	1,65	1,36
	21,23	18,68	19,26
7. Impor :	32,87	31,98	33,97
a. Antar Negara	17,36	15,51	16,03
b. Antar Provinsi	11,64	13,30	14,71
c. Jasa	3,87	3,17	3,23
P D R B	100,00	100,00	100,00

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 5.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan
Tahun 2011-2013 (Persen)

Uraian	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8,97	8,08	11,18
a. Makanan	8,42	8,57	12,98
b. Bukan Makanan	9,61	7,51	9,05
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	5,05	8,68	27,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,34	10,56	14,06
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,43	13,84	10,92
5. Perubahan Inventori	30,02	22,85	7,38
	94,16	-24,44	71,82
6. Ekspor :	11,31	11,45	14,44
a. Antar Negara	6,25	10,27	9,36
b. Antar Provinsi	37,83	15,06	36,24
c. Jasa	-1,73	13,37	-9,12
7. Impor :	14,24	8,51	14,40
a. Antar Negara	31,30	-3,41	14,19
b. Antar Provinsi	-3,01	26,43	15,35
c. Jasa	8,58	8,52	11,95
P D R B	11,75	10,15	12,68

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 6.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013 (Persen)

Uraian	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,80	4,49	3,89
a. Makanan	5,45	4,34	3,21
b. Bukan Makanan	6,22	4,68	4,69
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	4,45	4,57	19,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,11	0,89	5,51
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,77	8,72	6,60
5. Perubahan Inventori	17,10	24,54	0,61
6. Ekspor :	7,28	5,52	10,06
a. Antar Negara	3,72	4,02	6,38
b. Antar Provinsi	36,63	11,58	32,41
c. Jasa	-10,02	12,39	-13,00
7. Impor :	11,65	3,42	12,65
a. Antar Negara	30,11	-5,04	9,65
b. Antar Provinsi	-6,07	21,50	17,25
c. Jasa	4,49	-13,00	8,05
P D R B	6,51	6,28	6,06

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 7.
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi
Jawa Barat Menurut Penggunaan Tahun 2011-2013 (Tahun 2000 = 100)
(Persen)

Uraian	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	236,42	244,53	261,70
a. Makanan	233,04	242,49	265,44
b. Bukan Makanan	240,50	247,00	257,28
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	189,56	197,01	209,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	377,17	413,31	446,81
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	252,35	264,23	274,94
5. Perubahan Inventori	310,29	306,07	326,67
6. Ekspor :	198,75	209,90	218,25
a. Antar Negara	181,96	192,88	198,29
b. Antar Provinsi	267,36	275,70	283,68
c. Jasa	271,30	273,68	285,86
7. Impor :	221,38	232,28	235,88
a. Antar Negara	221,87	225,67	235,02
b. Antar Provinsi	220,14	229,07	225,35
c. Jasa	222,90	278,04	288,08
P D R B	251,24	260,39	276,65

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 8.
Inflasi Tahun 2011-2013
(Persen)

Uraian	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,99	3,43	7,02
a. Makanan	2,82	4,05	9,47
b. Bukan Makanan	3,19	2,70	4,16
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	0,58	3,93	6,41
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,87	9,58	8,11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,24	4,71	4,05
5. Perubahan Inventori	11,04	-1,36	6,73
6. Ekspor :	3,76	5,61	3,98
a. Antar Negara	2,45	6,00	2,80
b. Antar Provinsi	0,88	3,12	2,90
c. Jasa	9,22	0,88	4,45
7. Impor :	2,31	4,92	1,55
a. Antar Negara	0,91	1,71	4,14
b. Antar Provinsi	3,27	4,06	-1,62
c. Jasa	3,92	24,74	3,61
P D R B	4,92	3,64	6,25

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 9.
Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi
Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011-2013 (jutaan rupiah)

Uraian	2011	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,67	2,82	2,40
a. Makanan	1,89	1,49	1,08
b. Bukan Makanan	1,78	1,33	1,32
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	0,02	0,02	0,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,36	0,05	0,30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,68	1,55	1,20
5. Perubahan Inventori	0,58	0,91	0,03
Diskrepansi	0,61	-0,43	1,59
	1,19	0,00	2,03
6. Ekspor :	3,24	2,47	4,47
a. Antar Negara	1,38	1,45	2,25
b. Antar Provinsi	10,30	2,97	9,88
c. Jasa	-0,19	0,19	-0,21
7. Impor :	3,65	1,12	4,05
a. Antar Negara	4,28	-0,87	1,50
b. Antar Provinsi	-0,80	2,50	2,29
c. Jasa	0,18	-0,50	0,26
P D R B	6,51	6,28	6,06

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat
Telp.: 022 7272595; 022 7201696; Faks.: 022 7213572
E-Mail: bps3200@bps.go.id
Website: <http://jabar.bps.go.id>